

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang – undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
- 2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);

:



- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 10);
- 14) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);
- 15) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 58);
- 16) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 17) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88); dan
- 18) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 89).

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah daerah

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

- Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tersebut. Besar kecilnya Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki suatu daerah.

Struktur ekonomi di Kabupaten Luwu Utara masih didominasi oleh sektor Pertanian. Berdasarkan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017, pada tahun 2017 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar 50,21 %.

Perekonomian Luwu Utara pada tahun 2018 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun – tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Luwu Utara tahun 2017 mencapai 7,60%, nilai mengalami peningkatan jika dibandingkan nilai laju pertumbuhan tahun 2016 sebesar 7,49%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor pertanian sebesar 50,21%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah bahkan laju pertumbuhannya negatif oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mencatat pertumbuhan (0,74)%.

2. Kebijakan Keuangan

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan, pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Luwu Utara, berupa indikator program dan kegiatan yang tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan terangkum dalam laporan kinerja Keuangan Daerah.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD yang tercapaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2018.

2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan di akhir tahun anggaran.
- 2) *Force Majeur* atas ketersediaan material dan peralatan untuk pembangunan proyek fisik.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan

Inti dari laporan keuangan adalah menyajikan dan menyediakan informasi mengenai anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

yang spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan akuntabilitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Informasi untuk tujuan akuntabilitas, antara lain dilakukan dengan:
1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Entitas akuntansi (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pimpinan entitas pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang lengkap terdiri dari: Laporan Posisi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Laba/Rugi Bersih (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) disusun dan disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (SKPKD).

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara disusun dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 1. mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 2. menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;



3. netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 4. dapat diverifikasi;
 5. mencerminkan kehati-hatian; dan
 6. mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya



- sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
 - b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
 3. Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dan relevan jika dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
 2. perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Materialitas dan Agregasi

- a. penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. informasi dianggap material apabila kelalaian untuk encantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun anggaran/takwim. Laporan keuangan dapat disajikan, untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun anggaran/takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan Neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas (akuntansi dan pelaporan) digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan SKPKD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPKD sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran.



Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang tersaji dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Dalam CaLK juga termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

- a. Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - 1. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
 - 3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- b. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- c. Suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, dengan mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 - 2. Pengakuan belanja;
 - 3. Pengakuan beban;
 - 4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - 5. Investasi;
 - 6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - 7. Kontrak-kontrak konstruksi;
 - 8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - 9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 10. Biaya penelitian dan pengembangan;
 - 11. Persediaan, baik yang dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - 12. Dana cadangan; dan
 - 13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
 - 1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 - 2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - 3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.



KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter/aset tetap bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau karena pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset tersebut jika dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan (*judgment*) dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan



- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5).



BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan pada TA 2018 adalah sebesar Rp1.282.825.003.353,81 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2018 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; (iii) Peningkatan dan Pemanfaat SDA; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tidak Terduga, dan (iv) Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA 2018 adalah sebesar Rp1.287.973.455.878,00 yang terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp1.025.298.423.128,00 (ii) Belanja Modal sebesar Rp260.147.531.750,00 (iii) belanja tak terduga sebesar Rp170.217.000,00 dan (iv) Transfer sebesar Rp2.357.284.000,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka Defisit Anggaran yang terjadi pada TA 2018 adalah sebesar (Rp5.148.452.524,19).

Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2018 adalah sebesar Rp11.417.210.642,44 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp20.417.210.642,44 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp9.000.000.000,00.

Berdasarkan Defisit Anggaran dan Pembiayaan Netto pada TA 2018 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp6.268.758.118,25.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I.1 PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.305.484.941.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.282.825.003.353,81 atau mencapai 98,26% dari anggaran dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1
Rincian Pendapatan Daerah
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
	PENDAPATAN				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	19.275.242.775,00	19.535.300.198,00	101,35	16.660.609.033,80
	Pendapatan Retribusi Daerah	11.466.742.900,00	11.240.548.227,00	98,03	9.600.875.784,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	3.077.430.000,00	1.707.466.202,00	55,48	1.527.430.097,40
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.871.920.832,00	80.799.757.850,81	98,69	81.870.214.590,11
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	115.691.336.507,00	113.283.072.477,81	97,92	109.659.129.505,31
B	PENDAPATAN TRANSFER				
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak	15.229.853.328,00	11.617.170.140,00	76,28	13.953.149.550,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.858.730.165,00	4.915.566.810,00	71,67	4.068.658.399,00
	Dana Alokasi Umum	655.693.773.000,00	655.693.773.000,00	100,00	653.395.912.000,00
	Dana Alokasi Khusus	262.743.673.000,00	255.514.760.202,00	97,25	241.266.392.667,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	940.526.029.493,00	927.741.270.152,00	98,64	912.684.112.616,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
	Dana Penyesuaian	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.935.597.000,00	27.821.713.056,00	92,94	29.115.057.608,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	15.041.800.000,00	14.521.893.133,00	96,54	14.657.179.426,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	44.977.397.000,00	42.343.606.189,00	94,14	43.772.237.034,00
	Bantuan Keuangan				
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Total Pendapatan Transfer	994.253.426.493,00	978.834.876.341,00	98,45	963.956.349.650,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	1.836.000.000,00	91,80	600.771.400,00
	Pendapatan Lainnya	193.540.178.000,00	188.871.054.535,00	97,59	136.961.285.600,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	195.540.178.000,00	190.707.054.535,00	97,53	137.562.057.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.305.484.941.000,00	1.282.825.003.353,81	98,26	1.211.177.536.155,31

1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp115.691.336.507,00 terealisasi sebesar Rp113.283.072.477,81 atau mencapai 97,92% dari anggaran, yang terdiri dari komponen penerimaan



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2
Rincian Pendapatan Asli Daerah
 (dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2018			2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pajak Daerah	19.275.242.775,00	19.535.300.198,00	101,35	16.660.609.033,80
	Pajak Hotel	191.115.000,00	199.120.002,00	104,19	171.619.700,00
	Pajak Restoran	1.357.135.109,00	1.804.628.750,00	132,97	1.502.385.025,80
	Pajak Hiburan	14.340.000,00	14.102.100,00	98,34	12.907.000,00
	Pajak Reklame	243.000.000,00	309.093.725,00	127,20	378.791.300,00
	Pajak Penerangan Jalan	8.025.676.311,00	8.127.868.309,00	101,27	6.893.225.795,00
	Pajak Galian Golongan C	4.714.198.000,00	4.179.871.000,00	88,67	3.514.497.000,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	598.000.000,00	880.460.150,00	147,23	3.548.226.297,00
	Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan	4.131.778.355,00	4.020.156.162,00	97,30	631.149.938,00
	Pajak Parkir	-	-	-	7.806.978,00
2	Retribusi Daerah	11.466.742.900,00	11.240.548.227,00	98,03	9.600.875.784,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.980.000.000,00	6.919.730.644,00	99,14	5.789.684.873,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan	180.000.000,00	181.800.000,00	101,00	142.670.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	320.048.000,00	64,01	384.502.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	904.879.200,00	811.492.884,00	89,68	782.830.630,00
	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	150.000.000,00	151.160.500,00	100,77	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	379.665.000,00	126,56	389.362.150,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	1.800.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.125.000.000,00	1.087.175.000,00	96,64	833.601.000,00
	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (rikkes ternak)	-	-	-	80.320.000,00
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	101.000.000,00	95.080.000,00	94,14	-
	Retribusi Tempat Pelelangan Ternak	24.000.000,00	22.060.000,00	91,92	20.080.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	125.000.000,00	82.718.000,00	66,17	73.380.000,00
	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	205.000.000,00	206.977.000,00	100,96	138.600.000,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	675.000.000,00	803.246.599,00	119,00	673.466.991,00
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	-	-	140.891.900,00
	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	1.450.000,00	29,00	3.990.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	30.000.000,00	16.637.500,00	55,46	-
	Retribusi Pengendalian Jasa Telekomunikasi	155.063.700,00	154.507.100,00	99,64	145.696.240,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.077.430.000,00	1.707.466.202,00	55,48	1.527.430.097,40
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sulsel	3.077.430.000,00	1.707.466.202,00	55,48	1.527.430.097,40
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.871.920.832,00	80.799.757.850,81	98,69	81.870.214.590,11
	Penerimaan Jasa Giro	2.236.525.000,00	1.813.144.044,00	81,07	2.393.481.218,50
	Pendapatan Bunga	2.162.630.000,00	2.765.917.768,00	127,90	2.770.205.398,55
	Pendapatan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.741.000,00	2.741.000,00	100,00	24.891.250,00
	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelak. Pekerjaan	176.866.000,00	232.383.665,00	131,39	267.555.565,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Pendapatan	2018			2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	587.794.000,00	224.702.200,00	38,23	-
	Pendapatan dari Pengembalian	1.707.303.432,00	1.165.931.678,38	68,29	557.648.406,89
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	18.017.950,00	-	-
	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	-	50.000.000,00
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	-	-	-	58.696.711.375,99
	Pendapatan Lain-lain BLUD	59.000.000.000,00	58.408.982.263,89	99,00	1.800.602.600,18
	Pendapatan Administratif Dana JKN	15.970.550.000,00	15.970.196.851,40	100,00	15.309.118.775,00
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	27.511.400,00	197.740.430,14	718,76	-
	Jumlah PAD	115.691.336.507,00	113.283.072.477,81	97,92	109.659.129.505,31

Dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah TA. 2018 sebesar Rp113.283.072.477,81, terdapat didalam penerimaan pelunasan Piutang Daerah, saldo awal Pendapatan Administrasi BLUD dan Pendapatan JKN dan penyetoran Kas Bendahara Penerima Tahun 2017, penyetoran jasa giro JKN Tahun 2017 serta setoran uang muka belanja tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

- Pelunasan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp231.501.014,00
- Penyetoran Kas Bendahara Penerima Tahun 2017 sebesar Rp51.414.000,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp39.374.184,00
- Pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp1.424.134.202,00
- Pelunasan Piutang TGR sebesar Rp36.488.322,00
- Pelunasan Piutang Lain-Lain (BPJS RSUD) sebesar Rp7.751.519.248,00
- Saldo Awal BLUD sebesar Rp155.147.009,89
- Saldo Awal JKN sebesar Rp448.311.153,40
- Penyetoran Jasa Giro JKN Tahun 2017 sebesar Rp3.097.259,00
- Penyetoran Uang Muka Belanja Tahun 2017 sebesar Rp13.656.885,00

1.1.2 Pendapatan Transfer

Dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari komponen penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bagi Hasil Pajak, Dana Penyesuaian dan Transfer Pemerintah Provinsi, dianggarkan sebesar Rp994.253.426.493,00 dan terealisasi sebesar Rp978.834.876.341,00 atau mencapai 98,45% dari anggaran dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3
Rincian Pendapatan Transfer
(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2018			2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	940.526.029.493,00	927.741.270.152,00	98,64	912.684.112.616,00
1	Bagi Hasil Pajak	15.229.853.328,00	11.617.170.140,00	76,28	13.953.149.550,00
	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	3.896.034.509,00	2.984.280.974,00	76,60	3.875.723.551,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Pendapatan	2018			2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Bagi Hasil PBB Pusat Bagi Rata	-	3.235.257.970,00	-	2.853.871.879,00
	Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 atas Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	7.162.571.000,00	4.667.854.814,00	65,17	6.662.945.447,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	373.017.192,00	380.156.845,00	101,91	125.106.300,00
	Bagi Hasil Cukai Tembakau	-	219.833.000,00	-	234.390.056,00
	Upah Pungut PBB Migas dan PBB Perkebunan	165.776.936,00	129.786.537,00	78,29	201.112.317,00
	Bagi Hasil CHT	220.056.691,00	-	-	-
	Bagi Hasil PBB Pro Rata	3.412.397.000,00	-	-	-
2	Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA	6.858.730.165,00	4.915.566.810,00	71,67	4.068.658.399,00
	Dari Provinsi atas Sumber Daya Hutan	29.802.887,00	27.568.562,00	92,50	8.997.687,00
	Iuran Tetap (Land Rent)	1.257.481.531,00	571.309.897,00	45,43	633.949.241,00
	Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.296.578.076,00	2.752.536.010,00	83,50	1.840.292.571,00
	Pungutan Hasil Perikanan	1.042.211.671,00	701.234.591,00	67,28	447.937.200,00
	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	23.000,00	74.650,00	324,57	-
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	1.232.633.000,00	862.843.100,00	70,00	1.136.817.321,00
	Bagi Hasil Dana Reboisasi	-	-	-	664.379,00
3	Dana Alokasi Umum	655.693.773.000,00	655.693.773.000,00	100,00	653.395.912.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	262.743.673.000,00	255.514.760.202,00	97,25	241.266.392.667,00
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	79.774.500.000,00	79.549.148.000,00	99,72	68.991.046.000,00
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	12.536.923.000,00	11.981.622.118,00	95,57	8.988.400.000,00
	DAK Bidang Infrastruktur Minum/ Air Bersih	792.502.000,00	770.691.763,00	97,25	-
	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	2.050.414.000,00	2.050.000.000,00	99,98	-
	DAK Bidang Kesehatan	46.285.664.000,00	45.606.419.789,00	98,53	34.188.294.147,00
	DAK Bidang Keluarga Berencana	894.160.000,00	553.321.800,00	61,88	537.157.000,00
	DAK Bidang Pendidikan	10.616.229.000,00	10.599.509.000,00	99,84	9.552.904.720,00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.429.224.000,00	1.425.511.000,00	99,74	1.527.856.150,00
	DAK Bidang Pertanian	4.226.251.000,00	4.208.581.184,00	99,58	4.121.630.550,00
	DAK Bidang Pariwisata	1.075.697.000,00	1.074.000.000,00	99,84	-
	DAK Bidang Sanitasi	6.784.418.000,00	6.784.000.000,00	99,99	-
	DAK Bidang Perdagangan	-	-	-	1.775.055.000,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	15.642.309.000,00	15.302.446.111,00	97,83	7.624.388.000,00
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.353.000.000,00	882.825.000,00	65,25	1.041.750.000,00
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	66.406.644.000,00	61.979.459.020,00	93,33	62.638.608.900,00
	Tunjangan Khusus Guru	4.114.655.000,00	4.114.655.000,00	100,00	2.899.543.200,00
	Bantuan Operasional Persalinan (Jampersal)	-	-	-	846.722.000,00
	Dana Akreditasi Puskesmas	-	-	-	660.070.000,00
	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.173.000.000,00	4.144.064.230,00	99,31	3.568.000.000,00
	Bantuan Operasional KB	3.386.040.000,00	3.386.039.500,00	100,00	704.760.000,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.202.043.000,00	1.102.466.687,00	91,72	1.103.675.000,00
	Penyelesaian DAK FISIK 2016	-	-	-	30.496.532.000,00
B	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
	Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
C	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	44.977.397.000,00	42.343.606.189,00	94,14	43.772.237.034,00
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.935.597.000,00	27.821.713.056,00	92,94	29.115.057.608,00
	Pajak Kendaraan Bermotor	8.692.389.000,00	8.116.810.641,00	93,38	8.286.761.277,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.511.679.000,00	7.088.115.082,00	94,36	8.003.671.644,00
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.731.529.000,00	12.616.787.333,00	91,88	12.798.085.486,00
	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	-	-	-	26.539.201,00
2	Dana Bagi Hasil Lainnya	15.041.800.000,00	14.521.893.133,00	96,54	14.657.179.426,00
	Dana Bagi Hasil Lainnya	15.041.800.000,00	14.521.893.133,00	96,54	14.657.179.426,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	994.253.426.493,00	978.834.876.341,00	98,45	963.956.349.650,00

Berdasarkan realisasi penerimaan DAK TA 2018 sebesar Rp255.514.760.202,00 masih terdapat sisa dana DAK TA 2018 yang



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp5.384.204.210,00, yang terdiri dari :

- Sisa DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp345.848.475,00
- Sisa DAK Bidang Air Minum sebesar Rp23.697.223,00
- Sisa DAK Bidang Pertanian sebesar Rp24.116.509,00
- Sisa DAK Bidang Kelautan sebesar Rp2.423.600,00
- Sisa DAK Bidang Pariwisata sebesar Rp53.700.000,00
- Sisa DAK Bidang Jalan sebesar Rp3.962.550.100,00
- Sisa DAK Bidang Irigasi sebesar Rp599.081.110,00
- Sisa DAK Non Fisik – Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp183.871.500,00
- Sisa DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp188.915.693,00

Terdapat kegiatan dan DAK Tahun 2018 yang dibiayai dengan menggunakan Dana Sisa DAK Tahun 2017 sebesar Rp1.662.241.238,00, dengan rincian sebagai berikut :

- DAK Non Fisik – Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp1.490.006.420,00
- DAK Non Fisik – Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp56.175.000,00
- DAK Non Fisik – Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp12.877.655,00
- DAK Non Fisik – Bantuan Operasional KB sebesar Rp4.571.500,00
- DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp98.610.663,00

Rincian realisasi penerimaan DAK TA 2018, perinciannya sebagai berikut :

Tabel 4
Rincian Sisa Dana DAK Tahun 2018
 (dalam rupiah)

URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA KAS
DAK REGULER	145.837.182.536,00	141.424.846.629,00	4.412.335.907,00
1. DAK Bidang Pendidikan	10.599.509.000	10.599.509.000	-
2. DAK Bidang Kesehatan	46.159.741.589,00	45.813.893.114,00	345.848.475,00
- Pelayanan Kesehatan Dasar	7.361.789.000	7.114.985.550,00	246.803.450,00
- Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	4.362.419.646	4.359.827.546,00	2.592.100,00
- Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.053.872.273	3.957.419.348,00	96.452.925,00
- Pelayanan Keluarga Berencana	553.321.800	553.321.800	-
- Prioritas Daerah	29.828.338.870	29.828.338.870	-
3. DAK Bidang Air Minum	770.691.763	746.994.540,00	23.697.223,00
4. DAK Bidang Sanitasi	2.050.000.000	2.050.000.000	-
5. DAK Bidang Pertanian	4.208.581.184	4.184.464.675	24.116.509,00
- Dinas TPHP	3.726.251.000	3.726.251.000	-
- Dinas Ketahanan Pangan	482.330.184	458.213.675,00	24.116.509,00
6. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.425.511.000	1.423.087.400,00	2.423.600,00
7. DAK Bidang Pariwisata	1.074.000.000	1.020.300.000,00	53.700.000,00
6. DAK Bidang Jalan	79.549.148.000	75.586.597.900,00	3.962.550.100,00
DAK PENUGASAN	18.765.622.118	18.166.541.008,00	599.081.110,00
1. DAK Bidang Sanitasi	6.784.000.000	6.784.000.000	-
2. DAK Bidang Irigasi	11.981.622.118	11.382.541.008,00	599.081.110,00
JUMLAH DAK FISIK	164.602.804.654,00	159.591.387.637,00	5.011.417.017,00
DAK NON FISIK	90.911.955.548,00	92.201.409.593,00	(1.289.454.045,00)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SISA KAS
1. Tunjangan Profesi Guru	61.979.459.020	63.469.465.440,00	(1.490.006.420,00)
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru	882.825.000	939.000.000,00	(56.175.000,00)
3. Tunjangan Khusus Guru	4.114.655.000	3.930.783.500,00	183.871.500,00
4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.144.064.230	4.156.941.885,00	(12.877.655,00)
5. Bantuan Operasional Kesehatan	15.302.446.111	15.113.530.418,00	188.915.693,00
6. Bantuan Operasional KB	3.386.039.500	3.390.611.000,00	(4.571.500,00)
7. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.102.466.687	1.201.077.350,00	(98.610.663,00)
JUMLAH DAK	255.514.760.202,00	251.792.797.230,00	3.721.962.972,00

1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp195.540.178.000,00 dan terealisasi sebesar Rp190.707.054.535,00 atau 97,53% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5
Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah
(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	2018			2017
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Hibah (PDAM)	2.000.000.000,00	1.836.000.000,00	91,80	600.771.400,00
2	Pendapatan Lainnya	193.540.178.000,00	188.871.054.535,00	97,59	136.961.285.600,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		195.540.178.000,00	190.707.054.535,00	97,53	137.562.057.000,00

Pendapatan Hibah sebesar Rp1.836.000.000,00 merupakan Dana Pemerintah Pusat untuk PDAM dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp188.871.054.535,00 terdiri dari : Transfer Dana Desa sebesar Rp149.391.556.135,00 dan Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) sebesar Rp39.479.498.400,00.

1.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2018 anggaran belanja dan transfer dialokasikan sebesar Rp1.317.334.054.805,73 dan terealisasi sebesar Rp1.287.973.455.878,00 atau mencapai 97,77% dari anggaran. Realisasi belanja daerah dan transfer sebesar Rp1.287.973.455.878,00 dialokasikan untuk :

Tabel 6
Rincian Belanja Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	2018			2017
		Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	Belanja Operasi	1.039.952.067.109,28	1.025.298.423.128,00	98,59	939.754.038.359,88
2	Belanja Modal	274.283.155.696,45	260.147.531.750,00	94,85	282.857.965.171,00
3	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	170.217.000,00	34,04	957.252.720,00
4	Transfer	2.598.832.000,00	2.357.284.000,00	90,71	1.722.938.000,00
Jumlah Belanja dan Transfer		1.317.334.054.805,73	1.287.973.455.878,00	97,77	1.225.292.194.260,88

1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.039.952.067.109,28 dan terealisasi sebesar Rp1.025.298.423.128,00 atau mencapai 98,59% dari anggaran. Realisasi belanja operasi tersebut dialokasikan untuk :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 7
 Rincian Belanja Operasi
 (dalam rupiah)

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran	Realisasi	
				Realisasi
				(%)
				432.162.136.824,00
				98,91
				446.264.057.716,00
				98,02
1	Belanja Pegawai	451.201.258.550,00	319.461.104.503,00	100,00
2	Belanja Barang dan Jasa	325.927.365.233,28	100.000.000,00	98,43
3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	43.058.299.200,00	98,83
4	Belanja Hibah	43.742.926.326,00	216.414.961.709,00	98,59
5	Belanja Bantuan Sosial	218.980.517.000,00	1.025.298.423.128,00	
	Jumlah Belanja Operasi	1.039.952.067.109,28	1.025.298.423.128,00	

1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp446.264.057.716,00 atau 98,91% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp451.201.258.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8
 Rincian Belanja Pegawai
 (dalam rupiah)

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran	Realisasi	
				Realisasi
				(%)
				409.895.233.324,00
				99,04
				444.140.222.792,00
				99,98
A	Belanja Pegawai Tidak Langsung	444.140.222.792,00	439.887.691.968,00	99,98
1	Gaji Dan Tunjangan	294.161.929.730,00	294.096.708.316,00	96,79
2	Tambahan Penghasilan PNS	126.715.639.283,00	122.649.817.920,00	99,97
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD	8.734.486.700,00	8.731.707.842,00	99,85
4	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	164.762.000,00	164.512.774,00	98,70
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	4.872.765.000,00	4.809.600.000,00	91,89
6	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	54.413.075,00	50.000.000,00	95,41
7	Insentif Pungutan Pajak Daerah	296.586.925,00	282.974.949,00	96,31
8	Insentif Pungutan Retribusi Daerah	98.526.079,00	94.891.585,00	99,98
9	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.560.000,00	99,62
10	Belanja luran Asuransi PNSD	8.839.514.000,00	8.805.918.582,00	90,30
	Belanja Pegawai Langsung	7.061.035.758,00	6.376.365.748,00	
1	Honorarium PNS	6.773.660.758,00	6.110.615.748,00	92,47
2	Honorarium Non PNS	-	265.750.000,00	98,91
3	Uang Lembur	287.375.000,00	446.264.057.716,00	
	Jumlah Belanja Pegawai	451.201.258.550,00	446.264.057.716,00	

Dari jumlah realisasi Belanja Pegawai TA. 2018 sebesar Rp446.264.057.716,00 terdapat didalam pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp 1.223.123.306,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 adalah sebesar Rp319.461.104.503,00 atau 98,02% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp325.927.365.233,28 dengan uraian belanja barang per jenis sebagai berikut.

Tabel 9
Rincian Belanja Barang dan Jasa
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2018			REALISASI 2017
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	7.343.372.933,00	7.227.201.815,00	98,42	6.589.428.156,00
2	Belanja Bahan/Material	10.301.412.100,00	10.234.885.905,00	99,35	8.460.322.370,00
3	Belanja Jasa Kantor	56.156.301.212,00	54.791.519.560,00	97,57	45.028.681.604,00
4	Belanja Premi Asuransi	293.668.000,00	292.188.000,00	99,50	172.955.250,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.548.629.795,00	5.420.740.147,00	97,70	4.743.481.546,00
6	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9.403.795.250,55	8.979.523.211,00	95,49	8.486.165.848,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.258.897.500,00	2.192.630.500,00	97,07	2.354.841.050,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	602.381.984,00	599.588.512,00	99,54	288.360.000,00
	Belanja Sewa Alat Berat	348.513.250,00	348.392.750,00	99,97	-
9	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	683.379.000,00	658.535.332,00	96,36	1.453.233.487,00
10	Belanja Makanan Dan Minuman	12.440.342.047,00	12.225.705.470,00	98,27	11.386.838.400,00
11	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	384.600.000,00	383.820.000,00	99,80	290.824.000,00
12	Belanja Pakaian Kerja	1.459.355.000,00	1.116.561.721,00	76,51	663.203.000,00
13	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	457.596.000,00	456.923.600,00	99,85	497.908.320,00
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	120.000.000,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	66.023.788.172,73	65.517.824.933,00	99,23	68.417.948.475,00
16	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.147.860.000,00	2.013.626.596,00	93,75	3.343.827.000,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	1.012.950.000,00	1.012.784.000,00	99,98	579.384.000,00
18	Belanja Pemeliharaan	5.954.869.950,00	5.931.914.361,00	99,61	5.085.896.017,00
19	Belanja Pelay. Pend. Dan Kes. Gratis	17.717.637.127,00	17.513.955.823,00	98,85	12.531.029.116,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.200.000.000,00	55.927.328.269,00	97,78	59.564.162.855,28
21	Belanja Barang dan Jasa Kapitasi Puskesmas JKN FKTP UPTD Puskesmas	14.682.973.080,00	13.695.552.719,00	93,28	12.623.367.621,60
22	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	4.782.143.508,00	4.565.562.473,00	95,47	3.207.318.846,00
25	Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Dana BOS	34.040.248.624,00	33.678.525.052,00	98,94	-
26	Belanja Barang dan Jasa UPTD	14.608.650.700,00	14.601.813.754,00	99,95	9.659.588.268,00
	JUMLAH	325.927.365.233,28	319.461.104.503,00	98,02	265.548.765.229,88

Dari jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2018 sebesar Rp319.461.104.503,00 terdapat didalam pelunasan Utang Belanja Jasa (Listrik, Air, Telepon dan Cetak) Tahun 2017 sebesar Rp678.669.962,00, pelunasan Utang Pajak Kendaraan Tahun 2017 sebesar Rp33.414.583,00, Pelunasan Belanja JKN Kapitasi, JKN FKTP UPTD Puskesmas sebesar Rp557.175.788,00, pelunasan Belanja JKN sebesar Rp28.476.700,00, pelunasan Utang Obat TA. 2017 pada RSUD Andi Jemma sebesar Rp 1.429.172.941,00 dan pelunasan Utang Belanja Hibah sebesar Rp130.603.839,00

1.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2018 adalah sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp100.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang diperuntukan bagi dana subsidi untuk pelaksanaan Pasar Murah di 9 Kecamatan Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag berdasarkan SK Nomor 188.4.45/286/V/2018 tentang Persetujuan Pemanfaatan Dana Bantuan Subsidi untuk Pelaksanaan Pasar Murah di 9 Kecamatan Kabupaten Luwu Utara TA. 2018.

1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2018 adalah sebesar Rp43.058.299.200,00 atau 96,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp43.742.926.326,00. Adapun uraian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
Rincian Belanja Hibah
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2018			REALISASI 2017
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Hibah Kpd Badan/ Lembaga/ Organisasi	10.295.000.000,00	9.811.815.600,00	95,31	9.808.746.850,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	3.835.200.000,00	3.757.800.000,00	97,98	3.206.400.000,00
3	Uang untuk diberikan Kpd Masyarakat	605.250.000,00	595.250.000,00	98,35	8.000.000,00
4	Belanja Barang untuk diserahkan Kpd Masyarakat/ Pihak Ketiga	29.007.476.326,00	28.893.433.600,00	99,61	24.347.754.456,00
	Jumlah	43.742.926.326,00	43.058.299.200,00	98,43	37.370.901.306,00

Penyaluran Belanja Hibah TA 2018 kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.9.811.815.600,00 diperuntukkan bagi rumah-rumah ibadah, dan organisasi masyarakat/sosial. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 3.757.800.000,00 diperuntukkan bagi Biaya Operasional Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Penyaluran Dana Hibah berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/462/XI/2018 Tentang Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah penerima dana hibah sebanyak 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) organisasi masyarakat dan Taman Kanak-Kanak dengan total sebesar Rp13.569.615.600,00, rincian dapat dilihat pada lampiran 1a.

Belanja Barang dan Jasa Hibah berupa Uang yang diberikan kepada masyarakat TA 2018 sebesar Rp.595.250.000,00 Sesuai SAP, realisasi Belanja dan Jasa berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat tersebut dikonversi menjadi Belanja Hibah yang peruntukannya untuk Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat sebesar Rp2.250.000,00, Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam sebesar Rp3.000.000,00 dan Pemberian Dana Stimulan Bagi 59 (lima puluh Sembilan) Wirausaha Pemula.



Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 sebesar Rp28.893.433.600,00. Sesuai SAP, realisasi Belanja dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat tersebut dikonversi menjadi Belanja Hibah yang peruntukkannya tersebar pada SKPD di Kabupaten Luwu Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Pekerjaan Umum** sebesar Rp2.228.765.581,00 berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) pada 4 (empat) desa di 3 (tiga) kecamatan, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 1b*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Koperindag** sebesar Rp29.950.000,00 berupa pemberian bantuan alat bagi kelompok usaha Annisa di Kelurahan Kappuna dalam rangka fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 1c*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Pemuda dan Olahraga** sebesar Rp530.902.262,00 berupa Pekerjaan Penimbunan Lapangan Sepak Bola, Pengadaan Peralatan Arum Jeram, Pengadaan Peralatan Pinball, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 1d*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Ketahanan Pangan** sebesar Rp54.946.000,00 berupa Pemberian bibit tanaman kepada kelompok warga tani pada 10 (sepuluh) desa dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 1e*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Perikanan** sebesar Rp5.346.784.754,00 berupa Pemberian Bibit Ikan kepada kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Luwu Utara dalam rangka Pengembangan Budidaya Perikanan, Pembuatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Desa dan Pemberian Peralatan Tangkap Ikan, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 1f*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Lingkungan Hidup** sebesar Rp153.056.900,00 berupa Pengadaan Biogas Rumah pada 3 (tiga) kecamatan, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran 1g*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** sebesar Rp444.600.000,00 berupa Pengadaan Panggung Pentas Seni Budaya, Baju Adat, Alat Musik



- Rebana dan Alat Musik Kesenian, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran Ih*
- Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan** sebesar Rp8.717.208.455,00 berupa Pengadaan Bibit Padi dan Pupuk Organik dalam rangka kegiatan intensifikasi tanaman padi dan palawija, Pengadaan Alat Teknologi Pertanian dan Perkebunan Tepat Guna, Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Tanah/Irigasi, Pembangunan Jalan Tani, Pemberian serta Bibit Pertanian, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran Ii*
 - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Pendidikan** sebesar Rp367.984.362,00 berupa pembangunan ruang kelas dan pembangunan pagar taman kanak-kanak dan sekolah swasta, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran Ij*
 - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Sosial** sebesar Rp256.642.710,00 berupa Pengadaan alat bantu bagi penyandang cacat, bantuan KUBE bagi anak terlantar, bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi masyarakat miskin, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran Ik*
 - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Transmigrasi dan Ternaga Kerja** sebesar Rp2.392.166.955,00 berupa Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja dan pengembangan kawasan transmigrasi, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran Il*.
 - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** sebesar Rp170.117.500,00 berupa pemberian bibit kambing dan Itik bagi 6 (enam) kelompok tani, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran Im*.
 - Belanja Barang dan Jasa berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 pada **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** sebesar Rp8.200.308.121,00 berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan dan Pembangunan MCK kepada 28 (dua puluh delapan) kelompok swadaya masyarakat, dengan rincian yang dapat dilihat pada *lampiran In*.

1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 adalah sebesar Rp216.414.961.709,00 atau 99,60% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp218.980.517.000,00. Realisasi sebesar Rp216.414.961.709,00 diserahkan kepada :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp118.000.000,00
- Iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Imam Desa, Guru Mengaji, Sekolah Minggu dan Pasaraman sebesar Rp6.713.400,00
- Bantuan Kepada Imam Desa sebesar Rp1.725.300.000,00
- Bantuan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu kepada 58 Kepala Keluarga sebesar Rp2.475.000.000,00
- Bantuan Penyelesaian Studi kepada mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa berprestasi sebesar Rp980.000.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp210.128.257.309,00
- Bantuan Kepada Polres Kabupaten Luwu Utara dalam rangka rekrutmen bintara sebesar Rp200.000.000,00
- Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp781.691.000,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada lampiran 2.

1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp274.283.155.696,45 dan terealisasi sebesar Rp260.147.531.750,00 atau mencapai 94,85% dari anggaran. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 11
 Rincian Belanja Modal
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2018		2017
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Tanah	2.524.010.000,00	2.484.860.746,00	98,45
2	Belanja Peralatan dan Mesin	50.443.497.024,00	49.666.786.885,00	98,46
3	Belanja Bangunan dan Gedung	50.069.098.608,00	45.746.603.303,00	91,37
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.487.802.147,45	157.065.227.976,00	94,34
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.758.747.917,00	5.184.052.840,00	108,94
	Jumlah Belanja Modal	274.283.155.696,45	260.147.531.750,00	94,85

Dari jumlah realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp260.147.531.750,00, terdapat pengadaan barang-barang yang tidak memenuhi batas kapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap senilai Rp2.598.936.999,00 dan terdapat pula pembayaran utang TA. 2017 kepada pihak ketiga sebesar Rp8.863.067.689,00.

1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 adalah sebesar Rp2.484.860.746,00 atau 98,45% dari jumlah yang



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp2.524.010.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12
Rincian Belanja Modal Tanah
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	2.524.010.000,00	2.484.860.746,00	98,45	5.092.072.100,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah	2.524.010.000,00	2.484.860.746,00	98,45	5.092.072.100,00

1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2018 adalah sebesar Rp49.666.786.885,00 atau 92,79% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp50.443.497.024,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	990.000.000,00	951.177.000,00	96,08	3.272.615.400,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.400.000.000,00	1.375.157.000,00	98,23	42.185.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.738.856.724,00	4.683.732.665,00	98,84	7.335.208.773,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	42.207.000,00	42.207.000,00	100,00	-
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	43.000.000,00	42.778.000,00	99,48	-
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	3.500.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	124.900.000,00	112.880.000,00	90,38	71.599.880,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	34.000.000,00	31.770.000,00	93,44	359.489.475,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00	3.500.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	366.825.000,00	366.725.000,00	99,97	794.282.300,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.074.075.700,00	2.720.678.141,00	88,50	4.266.071.015,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.609.519.000,00	4.536.930.809,00	98,43	5.144.871.225,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	162.262.250,00	162.031.850,00	99,86	1.034.869.400,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2018		(%)	2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.967.503.000,00	1.892.649.220,00	96,20	915.889.570,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	157.589.750,00	155.442.550,00	98,64	222.499.150,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	-	-	-	1.500.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	32.584.238.600,00	32.445.213.650,00	99,57	25.912.082.873,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	85.600.000,00	84.814.000,00	99,08	286.592.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	55.000.000,00	54.680.000,00	99,42	51.957.500,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		60.443.497.024,00	49.666.786.885,00	98,46	49.718.713.561,00

Dari jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp49.666.786.885,00, terdapat pengadaan barang-barang peralatan dan mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap senilai Rp1.651.027.779,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14
Rincian Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	1.309.000,00
2	Alat Bengkel/Ukur	5.872.000,00
3	Alat Pertanian	5.770.854,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.270.478.069,00
5	Alat Studio dan Komunikasi	5.608.636,00
6	Alat Kedokteran	323.361.755,00
7	Alat Laboratorium	38.627.465,00
Jumlah		1.651.027.779,00

Dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin, terdapat juga pelunasan utang kepada pihak ketiga TA. 2017 sebesar Rp19.910.000,00 yang merupakan Pengadaan Meubelair SDN 150 Pao.

1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 adalah sebesar Rp45.746.603.303,00 atau 91,37% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp50.069.098.608,00 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
(Dalam Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain))

Tabel 15
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No	Uraian	2018		(%)	2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.626.706.408,00	43.464.488.148,00	91,26	41.378.345.650,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	554.265.000,00	515.730.750,00	93,05	54.626.629,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	38.648.850,00	38.576.850,00	99,81	95.328.150,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	116.227.500,00	110.521.205,00	95,09	290.682.500,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	8.729.350,00	8.241.900,00	94,42	168.596.100,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	547.900.000,00	522.440.950,00	95,35	149.940.000,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.176.621.500,00	1.086.603.500,00	92,35	191.690.500,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		50.069.098.608,00	45.746.603.303,00	91,37	42.329.209.529,00

Dari jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar Rp45.746.603.303,00, terdapat pelunas utang kepada Pihak Ketiga tahun 2017 sebesar Rp13.52.995.783,00

1.2.2.4 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 adalah sebesar Rp157.065.227.976,00 atau 93,48% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp166.487.802.147,45 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No	Uraian	2017		(%)	2016
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	125.651.047.573,45	119.441.932.390,00	95,06	121.043.381.689,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.554.723.850,00	5.135.621.215,00	92,46	16.380.213.950,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	16.299.960.450,00	15.084.115.613,00	92,54	21.608.295.208,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	200.000.000,00	190.572.250,00	95,29	-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	2.528.044.950,00	2.417.479.248,00	95,63	2.078.104.058,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	24.640.000,00	21.760.000,00	88,31	-



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2017		2016
		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	493.460.300,00	468.787.286,00	95,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	12.081.860.574,00	10.779.144.678,00	89,22
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	-	-	-
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	-	-	-
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	-
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	3.506.634.450,00	3.378.867.251,00	96,36
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	147.430.000,00	146.948.045,00	99,67
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		166.487.802.147,45	157.065.227.976,00	94,34

Dari jumlah realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 sebesar Rp157.065.227.976,00 terdapat pelunasan utang kepada Pihak Ketiga tahun 2017 sebesar Rp7.458.360.899,00

1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 adalah sebesar Rp5.184.052.840,00 atau 108,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp4.758.747.917,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No.	Uraian	2018		2017
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	952.900.000,00	947.909.220,00	99,48
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	28.000.000,00	24.750.000,00	88,39
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	3.777.847.917,00	4.211.393.620,00	111,48
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.758.747.917,00	5.184.052.840,00	108,94

Dari jumlah realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp5.184.052.840,00 terdapat pengadaan aset tetap lainnya yang tidak memenuhi batas kapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang sesuai dengan kebijakan akuntansi



aset tetap senilai Rp947.909.220,00 yang berupa Pengadaan Buku pada Dinas Pendidikan.

1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp170.217.000,00 atau mencapai 34,04% dari anggaran. Realisasi belanja tak terduga berupa bantuan kepada 40 (empat puluh) KK di Desa Pengkedekan, Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang yang tertimpa bencana angin puting beliung sebesar Rp140.217.000,00 SK No. 188.4.45/489/XII/2018 dan Bantuan Kepada Ikatan Pelajar Mahasiswa Palu yang tertimpa Bencana Alam Gempa Bumi sebesar Rp30.000.000,00. Rincian penerima Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada lampiran 3.

1.3 TRANSFER

Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara TA 2018 dianggarkan sebesar Rp2.598.832.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.357.284.000,00 atau mencapai 90,71% dari anggaran. Realisasi Belanja Transfer meliputi:

Tabel 18
 Rincian Transfer Bagi Hasil
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	1.927.524.000,00	1.927.521.000,00	100,00	1.403.541.000,00
2	Belanja Bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	671.308.000,00	429.763.000,00	64,02	319.397.000,00
Jumlah Belanja Transfer		2.598.832.000,00	2.357.284.000,00	90,71	1.722.938.000,00

Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara TA 2018 sebesar Rp2.357.284.000,00 diperuntukkan untuk Operasional Pemerintah Desa (ADD-BHPDRD)

1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 11.849.113.805,73 dan terealisasi sebesar Rp 11.417.210.642,44 atau mencapai 96,35% dari anggaran. Realisasi pembiayaan daerah tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 19
 Rincian Pembiayaan
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2018		%	2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penerimaan Pembiayaan	20.849.113.805,73	20.417.210.642,44	97,93	37.963.771.901,30
2	Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
Pembiayaan Bersih		11.849.113.805,73	11.417.210.642,44	96,35	34.963.771.901,30



1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan TA 2018 terdiri dari :

- 1.4.1.1 Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp20.849.113.805,73,00 dan terealisasi sebesar Rp20.245.655.642,44.
- 1.4.1.2 Penerimaan Piutang Dana Bergulir tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp7.555.000,00.
- 1.4.1.3 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp164.000.000,00

1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Untuk Tahun Anggaran 2018 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp9.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sul-Sel sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan SK Nomor : 188.4.45/83/I/2018 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sul-Sel dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah - PDAM Tirta Bukae sebesar Rp2.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/263/IV/2018 tentang Penyertaan Modal kepada PDAM.

1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) pada LRA sebesar Rp6.268.758.118,25 berupa:

- Kas di Kas Daerah	Rp	5.261.874.869,96
- Kas di Bendahara BLUD	Rp	156.240.415,89
- Kas di Bendahara JKN	Rp	827.327.232,40
- Kas di Bendahara BOS	Rp	8.957.600,00
- Kas di Bendahara Penerima	Rp	14.358.000,00

Terdapat Kas di Bendahara Penerima sebesar Rp14.358.000,00 yang disebabkan oleh Pendapatan pada Bendahara Penerimaan yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.718.000,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp11.640.000,00

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo anggaran lebih akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.268.758.118,25.

Tabel 20
 Laporan Perubahan – Saldo Anggaran Lebih
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2018	2017
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	20.849.113.805,73	40.554.707.880,68
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	20.849.113.805,73	40.554.707.880,68
3	Subtotal (1 - 2)	-	-



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2018	2017
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	6.268.758.118,25	20.849.113.805,73
5	Subtotal (3 + 4)	6.268.758.118,25	20.849.113.805,73
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain – Lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	6.268.758.118,25	20.849.113.805,73

3. NERACA

Posisi keuangan per 31 Desember 2018 adalah jumlah Aset sebesar Rp1.360.570.360.782,50 dan jumlah Kewajiban sebesar Rp24.858.682.328,77 dan Ekuitas sebesar Rp1.335.711.678.453,73

- Jumlah Aset sebesar Rp1.360.570.360.782,50 terdiri dari :
 - Aset lancar : Rp. 53.822.931.405,33
 - Investasi Jangka Panjang : Rp. 20.638.203.617,20
 - Aset Tetap : Rp. 1.275.141.030.802,53
 - Aset Lainnya : Rp. 10.968.194.957,45

- Jumlah Kewajiban sebesar Rp24.858.682.328,77 terdiri dari :
 - Kewajiban Jangka Pendek sebesar : Rp. 24.858.682.328,77
 - Kewajiban Jangka Panjang sebesar : Rp. 0,00

- Jumlah Ekuitas sebesar : Rp1.335.711.678.453,73

3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.360.570.360.782,50 dan Rp1.266.734.825.077,63 yang terdiri atas :

Tabel 21
Rincian Aset
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1	Aset Lancar	53.822.931.405,33	51.271.110.661,79
2	Investasi Jangka Panjang	20.638.203.617,20	11.126.441.989,20
3	Aset Tetap	1.275.141.030.802,53	1.124.605.611.130,11
4	Aset Lainnya	10.968.194.957,45	79.731.661.296,53
Jumlah Aset		1.360.570.360.782,50	1.266.734.825.077,63



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah aset yang direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp53.822.931.405,33 dan Rp51.271.110.661,79 yang terdiri atas:

Tabel 22
Rincian Aset Lancar
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1	Kas dan Bank	6.277.512.534,25	20.921.581.430,06
	Kas di Kas Daerah	5.261.874.869,96	20.245.655.642,44
	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.491.514,00	5.409.790,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	14.358.000,00	51.414.000,00
	Kas di Bendahara BLUD	156.240.415,89	155.147.009,89
	Kas di Bendahara BOS	8.957.600,00	10.358.400,00
	Kas di Bendahara JKN	828.590.134,40	453.596.587,73
	Kas di Bendahara FKTP		
2	Uang Muka Belanja	-	13.568.775,00
3	Belanja Dibayar Dimuka	104.789.637,95	85.938.157,00
4	Piutang	38.235.186.709,13	19.360.830.937,89
	Piutang Pajak	5.280.588.461,00	4.792.681.425,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(2.522.185.306,55)	(1.866.497.358,26)
	Piutang Retribusi	171.282.523,52	186.166.307,52
	Penyisihan Piutang Retribusi	(145.830.053,52)	(157.286.068,02)
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.779.109.567,00	1.424.134.202,00
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(23.895.547,84)	(7.120.671,01)
	Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	12.003.487.547,00	5.316.312.457,00
	Penyisihan Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	(60.017.437,74)	(26.581.562,29)
	Piutang Lainnya	19.285.067.554,06	9.828.073.483,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(532.420.597,81)	(129.051.277,06)
5	Persediaan	9.205.442.523,99	10.889.191.361,85
	Jumlah Aset Lancar	53.822.931.405,33	51.271.110.661,79

3.1.1.1 Kas dan Bank

Kas dan Bank adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas dan Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.277.512.534,25. Saldo tersebut terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp5.261.874.869,96 Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.358.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.491.514,00 Kas di BLUD sebesar Rp156.240.415,89 Kas di Bendahara Dana BOS



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp8.957.600,00 dan Kas di Bendahara JKN sebesar Rp828.590.134,40.

1) **Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh BUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.261.874.869,96 yang berada di rekening Kas Daerah pada:

Tabel 23
Rekonsiliasi Kas Daerah
(dalam rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	JUMLAH	
			2018	2017
1	Bank SulSel 0091-001-000010695-4	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	2.261.424.652,66	6.845.966.025,83
2	Bank SulSel 0091-001-000010693-8	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	2.998.325.039,30	7.809.123.113,89
3	Bank Mandiri 170-00-0128036-5	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	-	1.337.920,72
4	BNI 0087846338	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	782.706,00	5.226.137.390,00
5	BRI 0641-01-000721-30-5	Kas Umum Daerah Kab. Luwu Utara	1.342.472,00	-
Jumlah Menurut Bank			5.261.874.869,96	19.882.564.450,44

Terjadi defisit kas sebesar (Rp11.056.307.442,04) hal ini terjadi karena terdapat sisa kas yang dibatasi penggunaannya senilai Rp16.318.182.312,00 sedangkan kas di Kas Daerah sebesar Rp5.261.874.869,96, Rincian Kas yang dibatasi penggunaannya pada tabel berikut :

Tabel 24
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Sisa Dana DAK Tambahan TA 2016	2.770.751.200,00
2	Sisa Dana DAK Fisik TA. 2017	1.633.580.270,00
3	Sisa Dana DAK Fisik TA. 2018	5.011.417.017,00
4	Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru (TA. 2016 s.d 2018)	4.109.560.930,00
5	Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	121.500.000,00
6	Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru	268.035.748,00
7	Sisa Dana BOP PAUD	16.058.115,00
8	Sisa Dana BOP Kesehatan	528.778.582,00
9	Sisa Dana BOP KB	3.691.000,00
10	Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	965.650,00
11	Dana Desa yang tidak tersalur	1.853.843.800,00
Jumlah Kas yang dibatasi Penggunaannya		16.318.182.312,00
	Sisa Kas Daerah	5.261.874.869,96
Defisit Kas		(11.056.307.442,04)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dan terdapat kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp17.122.466.527,50, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Kewajiban Yang Harus dibayarkan
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Utang Kepada Pihak Ketiga (Belanja Hibah dan Modal)	11.328.644.351,50
2	Utang Pegawai	4.974.530.555,00
3	Utang Jasa Kantor	576.660.597,00
4	Utang Pajak Kendaraan	242.631.024,00
	Jumlah	17.122.466.527,50

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan yang berada di bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.491.514,00. Rincian pada tabel berikut :

Tabel 26
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per.31 Desember 2018	Per.31 Desember 2017	Tanggal Setor
1	Kecamatan Bone – Bone	40,00	40,00	5 April 2019
2	Kecamatan Mappedeceng	2.621.250,00	2.621.250,00	2 Januari 2019
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	-	1.896.000,00	
4	BKPSDM	-	97.500,00	
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	502.500,00	
6	BPBD	690.000,00	-	16 Januari 2019
7	Dinas Kependudukan dan Capil	2.472.724,00	-	21 Januari 2019
8	Dinas Sosial	1.349.500,00	-	15 Februari 2019
9	Dinas Ketahanan Pangan	208.000,00	-	7 Januari 2019
10	DPMPSTP	150.000,00	292.500,00	10 Januari 2019
	Jumlah	7.491.514,00	5.409.790,00	

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran berupa utang PFK dan Utang Pajak Makan dan Minuman yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum di setorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah yang terdiri dari Utang PFK Tahun 2016 pada Kecamatan Bone-Bone sebesar Rp40,00, Utang Pajak Makan dan Minuman pada Kecamatan Mappedeceng sebesar Rp2.621.250,00, BPBD sebesar Rp690.000, Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp2.472.724,00, Dinas Sosial sebesar Rp1.349.500,00, Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp208.000,00 dan DPMPSTP sebesar Rp150.000,00.



Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat dalam **Lampiran 4**.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan yang berada di bendahara penerimaan. Kondisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.358.000,00. Saldo tersebut merupakan Sisa Kas di pada Retribusi Perizinan Tertentu pada Dinas Perhubungan sebesar Rp11.640.000,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 7 Januari 2019 dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.718.000,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2019.

4) Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan yang berada di bendahara BLUD. Kas di BLUD pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp156.240.415,89. Laporan Keuangan BLUD-RSUD Andi Jemma dapat di lihat pada **Lampiran 5**.

5) Kas di Bendahara JKN

Kas di Bendahara JKN merupakan uang tunai dan saldo simpanan yang berada di Bendahara Puskesmas se-Kabupaten Luwu Utara.

Kas di Bendahara JKN pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp828.590.134,40 terdiri dari : Sisa Kas Bendahara JKN Kapitasi sebesar Rp827.327.232,40 Pajak yang dipungut oleh Bendahara JKN namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp601.041,00 serta Jasa Giro Kas JKN sebesar Rp661.861,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 27
Rincian Kas di Bendahara JKN
(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1	Malangke Barat	3.780.569,40	43.548.071,40
2	Malangke	12.395.360,00	6.042.986,00
3	Limbong	14.250.634,00	10.763.884,33
4	Seko	81.736.976,00	101.578.537,00
5	Sabbang	141.238.600,00	123.581.937,00
6	Lara	78.725,00	38.403.660,00
7	Baebunta	130.623.344,00	22.706.241,00
8	Bonebone	103.030.859,00	6.819.129,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
9	Masamba	134.466.688,00	20.971.410,00
10	Rampi	10.410.381,00	601.555,00
11	Sukamaju	4.416.937,00	1.993.978,00
12	Tanalili	104.616.020,00	69.134.083,00
13	Wonokerto	475.319,00	821.896,00
14	Cendana Putih	85.806.820,00	6.629.220,00
Jumlah		827.327.232,40	453.596.587,73

Rincian Mutasi Kas di Bendahara JKN dapat dilihat dalam Lampiran 6.

6) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS adalah uang tunai dan saldo simpanan yang berada di bendahara BOS sekolah se-Kabupaten Luwu Utara.

Kas di Bendahara BOS pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.957.600,00 yang terdiri dari : Saldo Bank sebesar Rp1.247.600,00 dan Saldo Tunai sebesar Rp7.710.000,00.

Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS dapat dilihat dalam Lampiran 7.

3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

3.1.1.3 Piutang Pajak Daerah

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah, namun sampai dengan akhir tahun anggaran/ periode pelaporan, wajib pajak belum melunasi kewajibannya.

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp5.280.588.461,00 dan Rp4.792.681.425,00 yang terdiri atas :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 28
Rincian Piutang Pajak Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Piutang Pajak Daerah	4.792.681.425,00	719.408.050,00	231.501.014,00	5.280.588.461,00
	- Pajak Hotel	17.158.500,00		2.715.000,00	14.443.500,00
	- Pajak Hiburan	14.116.400,00		78.100,00	14.038.300,00
	- Pajak Restoran	80.239.010,00		1.813.600,00	78.425.410,00
	- Pajak PBB-P2	4.681.167.515,00	717.646.175,00	226.894.314,00	5.171.919.376,00
	- Pajak Reklame		1.761.875,00		1.761.875,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.866.497.358,26)	(690.121.755,62)	(34.433.807,32)	(2.522.185.306,55)
	- Penyisihan Pajak Hotel	(17.158.500,00)	-	(2.715.000,00)	(14.443.500,00)
	- Penyisihan Pajak Hiburan	(14.116.400,00)	-	(78.100,00)	(14.038.300,00)
	- Penyisihan Pajak Restoran	(80.239.010,00)	-	(1.813.600,00)	(78.425.410,00)
	- Penyisihan PBB-P2	(1.754.983.448,26)	(690.112.946,24)	(29.827.107,32)	(2.415.269.287,18)
	- Penyisihan Pajak Reklame	-	(8.809,38)	-	(8.809,38)
	Jumlah Netto Piutang Pajak Daerah	2.926.184.066,74	29.286.294,39	197.067.206,68	2.758.403.154,45

Secara rinci Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 8a s.d. 8e*.

3.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Retribusi Daerah merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara atas diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah, namun sampai pada akhir tahun wajib retribusi belum melunasi kewajibannya tersebut.

Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp171.282.523,52 dan Rp186.166.307,52 yang terdiri atas:

Tabel 29
Rincian Piutang Retribusi Daerah
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Piutang Retribusi	186.166.307,52	24.490.400,00	39.374.184,00	171.282.523,52
	Retribusi Pasar	43.719.728,00		2.974.284,00	40.745.444,00
	Retribusi Gangguan (HO)	114.991.679,52		8.945.000,00	106.046.679,52
	Retribusi Menara Telekomunikasi	14.749.900,00	24.490.400,00	14.749.900,00	24.490.400,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.705.000,00		12.705.000,00	-
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(157.286.068,02)	(2.979.493,00)	(14.435.507,50)	(145.830.053,52)
	Penyisihan Retribusi Pasar	(42.157.114,00)	(386.100,00)	(2.882.292,00)	(39.660.922,00)
	Penyisihan Retribusi Gangguan (HO)	(114.991.679,52)	-	(8.945.000,00)	(106.046.679,52)
	Penyisihan Retribusi Retribusi Menara Telekomunikasi	(73.749,50)	(1.449.943,00)	(1.401.240,50)	(122.452,00)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uratan	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
	Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(63.525,00)	(1.143.450,00)	(1.206.975,00)	-
	Jumlah Netto Piutang Retribusi	28.880.239,50	21.510.907,00	24.938.676,50	25.452.470,00

Secara rinci Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada Lampiran 9a s.d. 9c.

3.1.1.5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, namun sampai pada akhir tahun belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.779.109.567,00 yang merupakan deviden atas investasi Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar dengan penyisihan sebesar Rp.23.895.547,84.

3.1.1.6 Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi merupakan hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, namun sampai pada akhir tahun belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.003.487.547,00 yang terdiri atas : Bagi Hasil Pajak Kendaraan sebesar Rp8.850.773.618,00 dan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp3.152.713.929,00 dengan penyisihan sebesar Rp.60.017.437,74.

3.1.1.7 Belanja dibayar dimuka

Belanja dibayar dimuka adalah belanja yang apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya.

Belanja dibayar dimuka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp104.789.637,95 yang merupakan Belanja STNK yang belum dimanfaatkan seluruhnya. Secara rinci Belanja dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 10.

3.1.1.8 Uang Muka Belanja

Uang muka belanja adalah uang muka pengadaan barang dan jasa yang diberikan kepada pihak ketiga pemasok



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berdasarkan kontrak pengadaan barang dan jasa, namun barang dan jasa belum diterima/diperoleh manfaatnya.

Sampai dengan per 31 Desember 2018 Pemerintah Daerah tidak memiliki Uang Muka Belanja.

3.1.1.9 Piutang Lainnya

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Piutang Lainnya Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp19.285.067.554,06 dan Rp9.828.073.483,00 yang terdiri atas :

Tabel 30
Rincian Piutang Lain-Lain
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Piutang Lain-lain	9.828.073.483,00	19.204.755.082,06	9.747.761.011,00	19.285.067.554,06
	- Piutang bunga	80.312.472,00	-	-	80.312.472,00
	- Piutang BPJS	9.747.761.011,00	18.418.416.620,00	9.747.761.011,00	18.418.416.620,00
	- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	786.338.462,06	-	786.338.462,06
2	Penyisihan Piutang Lain-lain	(129.051.277,06)	(1.188.502.454,37)	(785.133.133,62)	(532.420.597,81)
	- Penyisihan Piutang bunga	(80.312.472,00)	-	-	(80.312.472,00)
	- Penyisihan Piutang BPJS	(48.738.805,06)	(828.486.411,66)	(785.133.133,62)	(92.092.083,10)
	- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	(360.016.042,71)	-	(360.016.042,71)
	Jumlah Netto Piutang Lain - Lain	9.699.022.205,95	18.016.252.627,69	8.962.627.877,39	18.752.646.956,25

Piutang Lainnya sebesar Rp19.285.067.554,06 terdiri dari :

- Piutang Bunga dari Dana Bergulir sebesar Rp80.312.472,00, secara rinci dapat dilihat pada lampiran 11a sampai lampiran 11g
- Piutang BPJS pada RSUD Andi Jemma Masamba sebesar Rp18.418.416.620,00
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp786.338.462,06 terdiri dari : (1) Sewa tempat (kantin PKK) sebesar Rp1.200.000,00, rinciannya dapat dilihat pada lampiran 12a (2) Kelebihan Pembayaran Gaji Pensiun sebesar Rp604.413.304,00, rinciannya dapat dilihat pada lampiran 12b dan (3) Denda Keterlambatan sebesar Rp180.725.158,06, dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan Lanjutan Rehab Kantor Bupati sebesar Rp6.419.305,61, Kegiatan Pemeliharaan Ruas Jalan Kota Masamba sebesar Rp28.764.792,73, Kegiatan Pengaspalan Ruas Tondok Tua – Sumillin sebesar Rp33.611.571,85, Kegiatan Pengaspalan Ruas Ibukota Kecamatan Bone-Bone sebesar Rp24.568.761,82, Kegiatan Pembangunan Gedung OKA/ICU sebesar Rp81.657.316,36 dan Kegiatan Pembangunan GOR sebesar Rp5.703.409,69.



Rekapitulasi Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

3.1.1.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp9.205.442.523,99 dan Rp10.889.191.361,85. Persediaan per 31 Desember 2017 disajikan berdasarkan *stock opname* dan harga perolehan pada masing-masing SKPD.

Tabel 31
Rincian Persediaan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Bahan Material	9.243.894.061,85	8.948.373.773,99	9.243.894.061,85	8.948.373.773,99
	- Obat - Obat dan Alat Kesehatan	9.243.894.061,85	8.339.233.410,99	9.243.894.061,85	8.339.233.410,99
	- Alat Kontrasepsi	-	600.475.363,00		600.475.363,00
	- Pakan Ternak	-	8.665.000,00		8.665.000,00
2	Bahan Pakai Habis Kantor	68.105.142,00	163.144.460,00	68.105.142,00	163.144.460,00
	- ATK	50.664.070,00	65.644.850,00	50.664.070,00	65.644.850,00
	- Alat Listrik	1.705.540,00	46.649.000,00	1.705.540,00	46.649.000,00
	- Alat Pembersih	15.735.532,00	50.850.700,00	15.735.532,00	50.850.700,00
3	Cetak dan Penggandaan	158.905.000,00	93.924.200,00	158.905.000,00	93.924.200,00
4	Bahan Pemeliharaan	2.280.000,00	-	2.280.000,00	-
	- Aspal	2.280.000,00	-	2.280.000,00	-
5	Persediaan Lainnya	1.416.007.158,00	-	1.416.007.158,00	-
	- Hibah Barang	1.401.222.658,00	-	1.401.222.658,00	-
	- Makanan Pasien pada Puskesmas	14.784.500,00	-	14.784.500,00	-
	Jumlah	10.889.191.361,85	9.205.442.523,99	10.889.191.361,85	9.205.442.523,99

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 yang disajikan berdasarkan *stock opname* dan harga perolehan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 14a**.

Terdapat Persediaan Obat yang kadaluarsa Per 31 Desember 2018 pada Gudang Obat Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp66.550.593,25, rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 14b**.

3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.



3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.049.067.272,00 dan Rp1.056.622.272,00 yang merupakan Dana Bergulir dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32
Investasi Non Permanen
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Dana Bergulir	1.056.622.272,00		7.555.000,00	1.049.067.272,00
2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1.056.622.272,00)		(7.555.000,00)	(1.049.067.272,00)
Jumlah Netto Investasi Non Permanen					

Pengelola Dana Bergulir di BPMPD dan Dinas Koperindag telah melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan masa jatuh temponya (*aging schedule*) sehingga penyajian di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Dengan dilakukannya penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar dapat ditagih, diragukan dan tidak dapat ditagih.

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari : Investasi Dana Bergulir sebesar Rp1.049.067.272,00. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, maka pada TA 2018 dilakukan penggolongan Kualitas atas penyertaan dana bergulir yang terdapat di Dinas Koperindag dan BPMPD yang diragukan tertagih sebesar Rp1.049.067.272,00. Secara rinci disajikan dalam *Lampiran 15a s.d.15h*.

3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen terdiri dari :

Tabel 33
Investasi Permanen
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	PDAM	4.771.441.989,20	2.511.761.628,00		7.283.203.617,20
2	PT Bank Sulsel	6.355.000.000,00	7.000.000.000,00		13.355.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen		11.126.441.989,20	9.511.761.628,00		20.638.203.617,20



Mutasi bertambah sebesar Rp9.511.761.628,00 terdiri dari :
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1.836.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/263/IV/2018 tentang Penyertaan Modal kepada PDAM, Laba Tahun Berjalan yang diperoleh oleh PDAM sebesar Rp675.761.628,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Bank Sul-Sel untuk Tahun 2018 sebesar Rp7.000.000.000,00.

Investasi Pemerintah pada PDAM sebesar Rp7.283.203.617,20 merupakan nilai Penyertaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bukan berbentuk saham pada PDAM sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 67 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Luwu Utara. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan peraturan daerah atas penyertaan modal pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Luwu Utara, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT Bank Sulselbar.

Penyertaan modal disajikan dengan metode ekuitas sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM tahun buku 31 Desember 2018 yang telah di audit oleh KAP M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono. Laporan keuangan PDAM Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 16*.

Untuk Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menambahkan Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulselbar sebesar Rp7.000.000.000,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut berdasarkan SK Nomor : 188.4.45/83/I/2018 tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sul-Selbar.

Saldo Investasi pada PT. Bank Sulsel sebesar Rp13.355.000.000,00 merupakan penyertaan modal berbentuk saham sebanyak 13.355 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh lima) lembar saham @ Rp1.000.000,00 atau menguasai 1,39% kepemilikan PT Bank Sulselbar. Untuk tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperoleh pendapatan deviden sebesar Rp1.707.466.202,00.

3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.275.141.030.802,53 dan



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp1.124.605.611.130,11. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 di neraca merupakan hasil rekonsiliasi yang dilakukan Bidang Aset BPKAD dengan SKPD. Saldo akhir aset tetap di neraca merupakan penambahan dari Belanja Modal yang terealisasi selama Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan kapitalisasi belanja penunjang dan Hibah Barang yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018.

Tabel 34
Rincian Aset Tetap
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3.1.3.1	TANAH	168.100.230.196,91	-	168.100.230.196,91
	Tanah	168.100.230.196,91	-	168.100.230.196,91
3.1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	341.678.172.668,27	216.979.663.642,32	124.698.509.025,95
	Alat-Alat Besar	26.613.366.198,00	16.523.868.345,00	10.089.497.853,00
	Alat-Alat Angkutan	73.308.771.200,90	50.542.148.113,90	22.766.623.087,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.829.838.763,82	2.327.384.909,30	502.453.854,52
	Alat Pertanian	2.672.744.174,44	2.423.924.167,00	248.820.007,44
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	82.787.711.501,98	59.527.801.001,82	23.259.910.500,16
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	9.798.057.929,97	6.441.776.253,54	3.356.281.676,43
	Alat-Alat Kedokteran	105.410.835.965,07	51.728.868.032,02	53.681.967.933,05
	Alat-Alat Laboratorium	38.237.246.934,09	27.449.429.068,73	10.787.817.865,36
	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	19.600.000,00	14.463.751,00	5.136.249,00
3.1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	548.323.255.432,24	181.116.766.135,83	367.206.489.296,41
	Bangunan Gedung	542.005.373.102,12	178.259.527.437,01	363.745.845.665,11
	Bangunan Monumen	6.317.882.330,12	2.857.238.698,82	3.460.643.631,30
3.1.3.4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	1.322.895.396.898,98	751.963.984.701,72	570.931.412.197,26
	Jalan dan Jembatan	1.079.084.664.761,45	690.433.890.798,72	388.650.773.962,73
	Bangunan Air (Irigasi)	226.259.649.594,92	59.746.824.013,00	166.512.825.581,92
	Instalasi	3.513.870.275,00	567.536.762,00	2.946.333.513,00
	Jaringan	14.037.212.267,61	1.215.733.128,00	12.821.479.139,61
3.1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	15.391.645.788,46	11.504.564.185,46	3.887.081.603,00
	Buku dan Perpustakaan	296.595.914,00	-	296.595.914,00
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1.554.025.872,46	765.115.515,46	788.910.357,00
	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	Aset Tetap Renovasi	13.536.024.000,00	10.739.448.650,00	2.796.575.350,00
3.1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	40.317.308.465,00	-	40.317.308.465,00
	Total	2.438.706.009.447,88	1.161.564.978.645,33	1.275.141.030.802,55

Mutasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara disajikan sebagai berikut :

3.1.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp168.100.230.196,91 dan Rp165.795.081.368,91.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 35
Rincian Mutasi Aset Tetap - Tanah
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Tanah	165.795.081.368,91	2.584.774.828,00	279.626.000,00	168.100.230.196,91
	- Tanah	165.795.081.368,91	2.584.774.828,00	279.626.000,00	168.100.230.196,91
	Jumlah	165.795.081.368,91	2.584.774.828,00	279.626.000,00	168.100.230.196,91

Pada Tahun 2018 yang terdiri dari tanah bangunan dan tanah jalan terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.584.774.828,00 terdiri dari :

- Belanja Modal TA. 2018 sebesar Rp2.484.860.746,00
- Reklas dari Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.914.000,00
- Koreksi atas Aset Tetap – Tanah yang belum disajikan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 82 bidang tanah yang terdiri dari : 8 bidang tanah sekolah, 2 bidang tanah rumah khusus nelayan, 66 bidang tanah dibawah jaringan dan irigasi, dan 6 bidang tanah sarana umum, jalan dan drainase pada 2 perumahan di Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali atas aset tanah tersebut.

Sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp279.626.000,00 terdiri dari :

- Aset Tanah yang telah Hibah tahun 2018 sebesar Rp234.726.000,00
- Reklas Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp44.900.000,00

3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp341.678.172.668,27 dan Rp292.507.467.837,09.

Tabel 36
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
	Peralatan dan Mesin	292.507.467.837,09	56.120.641.059,00	5.783.003.535,82	342.845.105.360,27
1	Alat-alat Berat	24.610.941.198,00	2.009.836.500,00	7.411.500,00	26.613.366.198,00
2	Alat-alat Angkutan	69.791.343.127,90	7.374.326.790,00	3.856.898.717,00	73.308.771.200,90
3	Alat Bengkel dan Ukur	2.817.075.133,82	19.135.630,00	6.372.000,00	2.829.838.763,82
4	Alat Pertanian dan Peternakan	2.606.055.114,44	72.459.914,00	5.770.854,00	2.672.744.174,44
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	73.041.329.867,27	12.374.769.985,53	2.628.388.350,82	82.787.711.501,98



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
6	Alat Studio dan Komunikasi	8.269.118.791,50	1.540.179.774,47	11.240.636,00	9.798.057.929,97
7	Alat-alat Kedokteran	73.397.150.301,07	32.337.047.419,00	323.361.755,00	105.410.835.965,07
8	Alat Laboratorium	37.954.854.303,09	392.885.046,00	110.492.415,00	38.237.246.934,09
9	Alat Keamanan	19.600.000,00	-	-	19.600.000,00
	Jumlah	292.507.467.837,09	56.120.641.059,00	6.949.936.227,82	341.678.172.668,27

Pada Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp56.120.641.059,00, yang terdiri dari :

- Belanja Modal T.A 2018 sebesar Rp49.666.786.885,00
- Utang Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp74.150.000,00
- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp2.470.316.025,00
- Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp85.264.870,00
- Reklas dari alat laboratorium sebesar Rp56.874.950,00
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.325.413.579,00
- Aset Tetap dari Dana BOS sebesar Rp1.441.834.750,00

Sedangkan mutasi pengurangan sebesar Rp6.949.936.227,82 yang terdiri dari :

- Ekstrakompatabel Belanja Modal tahun 2018 sebesar Rp1.651.027.779,00
- Ekstrakompatabel Belanja Modal yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp328.515.750,00
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp218.500.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp554.230.031,82,00
- Reklasifikasi ke Alat Kedokteran sebesar Rp56.874.950,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp347.100.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp129.940.000,00
- Mutasi Antar SKPD sebesar Rp2.470.316.025,00
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.589.000,00
- Pembayaran Utang Pihak Ketiga sebesar Rp19.910.000,00
- Reklasifikasi Alat-alat Angkutan yang tidak diketahui keberadaannya ke asset lainnya sebesar Rp1.166.932.692,00

3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp548.323.255.432,24 dan Rp501.894.844.966,82.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 37
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
	Bangunan dan Gedung	501.894.844.966,82	68.880.119.491,42	22.451.709.026,00	548.323.255.432,24
1	Bangunan Gedung	496.990.058.720,70	66.671.843.407,42	21.656.529.026,00	542.005.373.102,12
2	Monumen dan Tugu	4.904.786.246,12	2.208.276.084,00	795.180.000,00	6.317.882.330,12
	Jumlah	501.894.844.966,82	68.880.119.491,42	22.451.709.026,00	548.323.255.432,24

Pada Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp68.880.119.491,42 yang terdiri dari :

- Belanja Modal TA. 2018 sebesar Rp45.746.603.303,00
- Utang Belanja Modal TA. 2018 sebesar Rp2.999.483.301,41,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.900.000,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.873.743.000,00
- Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.301.521.866,00
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.337.050.000,00
- Aset dari Belanja Modal Dana BOS sebesar Rp10.350.000,00
- Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp392.150.150,00
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp554.230.031,82
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.393.905.839,19
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.271.082.000,00

Adapun mutasi berkurang sebesar Rp22.451.709.026,00 yang terdiri dari:

- Penghapusan aset tetap sebesar Rp2.642.045.328,00
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp15.495.184.738,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp1.873.743.000,00
- Reklasifikasi ke aset tetap tanah sebesar Rp99.914.000,00
- Reklasifikasi ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp987.826.177,00
- Pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp1.352.995.783,00

3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.322.895.396.898,98 dan Rp1.161.435.416.531,08.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 38
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.161.435.416.531,08	176.681.116.379,90	15.221.136.012,00	1.322.895.396.898,98
1	Jalan dan Jembatan	956.164.263.518,36	133.752.822.250,09	10.832.421.007,00	1.079.084.664.761,45
2	Bangunan Air (Irigasi)	191.520.072.112,72	38.438.078.687,20	3.698.501.205,00	226.259.649.594,92
3	Instalasi	2.785.470.275,00	770.116.750,00	41.716.750,00	3.513.870.275,00
4	Jaringan	10.965.610.625,00	3.720.098.692,61	648.497.050,00	14.037.212.267,61
	Jumlah	1.161.435.416.531,08	176.681.116.379,90	15.221.136.012,00	1.322.895.396.898,98

Pada Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp176.681.116.379,90 yang terdiri dari :

- Belanja Modal Jalan irigasi dan Jaringan T.A 2018 sebesar Rp157.065.227.976,00
- Utang Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp7.417.513.479,09
- Reklasifikasi aset tetap jalan dan jembatan sebesar Rp59.686.700,00
- Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.543.823.365,00
- Reklasifikasi dari Bangunan Air sebesar Rp350.840.374,00
- Aset Tetap dari Dana BOS sebesar Rp6.050.000,00
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp531.356.294,81
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp347.100.000
- Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.932.340,00
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.805.165.262,00
- Reklasifikasi dari Jaringan sebesar Rp179.679.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Non Operasional sebesar Rp366.915.412,00
- Reklasifikasi dari gedung dan bangunan sebesar Rp987.826.177,00

Adapun mutasi berkurang adalah sebesar Rp15.221.136.012,00 antara lain sebagai berikut :

- Pembayaran Utang tahun 2017 sebesar Rp7.458.360.899,00
- Reklasifikasi dari Belanja gedung dan bangunan sebesar Rp392.150.150,00
- Reklasifikasi ke Jalan Jaringan sebesar Rp350.840.374,00
- Reklasifikasi bangunan air sebesar Rp239.365.700,00
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.779.668.889,00
- Ekstrakompatabel sebesar Rp750.000,00.



3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp15.391.645.786,46 dan Rp2.017.500.786,46.

Tabel 39
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
	Aset Tetap Lainnya	2.017.500.786,46	25.637.688.602,00	12.263.543.602,00	15.391.645.786,46
1	Buku dan Perpustakaan	282.795.214,00	7.989.777.582,00	7.975.976.882,00	296.595.914,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1.521.196.572,46	37.919.300,00	5.090.000,00	1.554.025.872,46
3	Hewan/Ternak dan Tanaman	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
4	Aset Tetap Renovasi	208.509.000,00	17.609.991.720,00	4.282.476.720,00	13.536.024.000,00
	Jumlah	2.017.500.786,46	25.637.688.602,00	12.263.543.602,00	15.391.645.786,46

Pada Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp25.637.688.602,00 yang terdiri dari :

- Belanja Modal T.A 2018 sebesar Rp5.184.052.840,00
- Utang Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp33.301.007,00
- Reklasifikasi dari buku dan perpustakaan sebesar Rp649.300,00
- Reklasifikasi dari Aset Non Operasional sebesar Rp13.327.515.000,00
- Utang Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp71.083.100,00
- Aset yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp7.054.388.362,00

Adapun mutasi berkurang sebesar Rp12.263.543.602,00 adalah dengan rincian sebagai berikut :

- Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.393.905.839,19.
- Reklasifikasi ke barang bercorak kesenian/kebudayaan sebesar Rp649.300,00
- Reklasifikasi ke aset jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp531.356.294,81
- Reklasifikasi ke peralatan dan mesin sebesar Rp2.325.413.579,00
- Ekstrakompatabel belanja modal yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp7.032.508.362,00
- Pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp31.801.007,00
- Ekstrakompatabel belanja modal tahun 2018 sebesar Rp947.909.220,00

Aset Tetap Renovasi merupakan Aset Tetap milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang dilakukan



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemeliharaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara.
Asset tetap renovasi per 31 Desember 2018 sebesar
Rp13.536.024.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 40
Rincian Aset Tetap Renovasi
(dalam rupiah)

NO	S.K.P.D	KODE BARANG	JENIS BARANG	PEROLEHAN	
				TAHUN	NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Dinas PUPR	4.13.1.4.1	ruas jl. Mabusa-Sae (apresial 2005)	31/12/2005	3.960.000.000,00
2	Dinas PUPR	4.13.1.4.1	ruas jl. Salutallang-Mabusa (apresial 2005)	31/12/2005	5.488.000.000,00
3	Dinas PUPR	4.13.1.4.1	Pemeliharaan Jalan ruas palandoan-Talampung	31/12/2008	41.750.000,00
4	Dinas PUPR	4.14.1.2.1	Rehab. mercu bendung Bone-Bone Desa Bone-Bone (P.Pemb. jar. irigasi)	31/12/2007	40.000.000,00
5	Dinas PUPR	4.14.1.2.1	Rehab. bendung DI Bungadidi Desa Bungadidi	31/12/2008	174.974.000,00
6	Dinas PUPR	4.14.1.2.4	Rehab. bendung irigasi Bungadidi 1 unit	31/12/2006	588.500.000,00
7	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. lantai saluran antara BB0-BB1 DI Bone-Bone Desa Bone-Bone(p.Pemb. jar. irigasi)	31/12/2007	45.000.000,00
8	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Pembuatan lining saluran DI Bone-Bone Kiri Desa Patila	31/12/2007	49.990.000,00
9	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Pembuatan lining saluran DI Bone-Bone Kiri Desa Bantimurung	31/12/2007	49.980.000,00
10	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. saluran DI Bone-Bone Kiri BS.6d-BS.6c Desa Patila	31/12/2008	128.989.000,00
11	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. saluran DI Bone-Bone BB.6-BB.7 Desa Muktisari	31/12/2008	128.720.000,00
12	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. setempat-setempat sal. sebelah kanan antara BS.5c-Bs.5d DI Bone-Bone Kiri Desa Patila	31/12/2008	68.283.000,00
13	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. sal. induk DI Bone-Bone Kanan antara BB.7-BB.8 Desa Banyu Urip	31/12/2008	132.909.000,00
14	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. saluran DI Bone-Bone kiri Desa Patila	31/12/2008	66.715.000,00
15	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Peningkatan sal. DI Bone-Bone Kel. Bone-Bone (keg. OP & Pemel. Irigasi)	31/12/2010	53.780.000,00
16	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Pemeliharaan lining saluran DI Bungadidi	31/12/2007	280.248.000,00
17	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehabilitasi saluran DI Bungadidi Desa Bungadidi	31/12/2008	174.499.000,00
18	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Rehab. saluran DI Bungadidi Desa Bungadidi	31/12/2008	50.000.000,00
19	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	OP. irigasi (Normalisasi sal. iridasi DI ungadidi	31/12/2008	50.000.000,00
20	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	pemberdayaan petani pemakai air (rehab saluran DI Bungadidi 35M & rehab. lantai sal DI Patila II)	31/12/2009	200.000.000,00
21	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Peningkatan Saluran DI. Bungadidi	31/12/2011	95.138.000,00
22	Dinas PUPR	4.14.1.3.2	Normalisasi saluran induk Suplesi kanjiro (p.Pemb. jar. irigasi)	31/12/2007	50.000.000,00
23	Dinas PUPR	4.14.1.3.3	Peningkatan saluran D.I Bungadidi WISMP	31/12/2011	99.000.000,00
24	Dinas PUPR	4.14.1.3.4	Rehab. saluran tersier BB.2 DI Bone-Bone Desa Banyu Urip	31/12/2008	120.666.000,00
25	Dinas PUPR	4.14.1.3.4	Peningkatan Jaringan DI. Bungadidi Desa Bungadidi Kec.Tana Lili	31/12/2012	96.700.000,00
26	Dinas PUPR	4.14.1.3.8	Keg. Pend. WISMP (Rehab. dengan metode partisipatif Bungadidi I & II)	31/12/2008	43.600.000,00
27	Dinas PUPR	4.14.1.4.2	Rehab saluran Pembuang Irigasi D.I Bone-Bone (Belum Ada FHO)	31/12/2011	520.928.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	KODE BARANG	JENIS BARANG	PEROLEHAN	
				TAHUN	NILAI
28	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Pembuatan bangunan bagi DI Bone-bone Kiri Desa Bantimurung	31/12/2007	49.951.000,00
29	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Rehab. bangunan bagi DI Bone-Bone Kiri Desa Patila	31/12/2008	35.975.000,00
30	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Op. Irigasi (Rehab. bagi BB 4 DI Bone-Bone Kanan Desa Mukti Sari	31/12/2008	19.000.000,00
31	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	bangunan bagi jaringan irigasi Bungadidi II	31/12/2006	55.500.000,00
32	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Op. irigasi (Pembuatan bangunan bagi DI Bungadidi	31/12/2008	40.000.000,00
33	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	peningkatan bangunan bagi DI Bungadidi Desa Bungadidi 1 unit	31/12/2009	54.945.000,00
34	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Rehab. bangunan bagi DI Bungadidi Desa Bungadidi	31/12/2010	46.000.000,00
35	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Peningkatan Bangunan Bagi DI Bungadidi Kec.Bone-Bone	31/12/2012	80.950.000,00
36	Dinas PUPR	4.14.1.6.1	Pembuatan bangunan bagi kanjiro 1 unit (P.pemb. jar.irigasi)	31/12/2007	50.000.000,00
37	Dinas PUPR	4.14.1.6.5	Rehab. bangunan penerjun (stordam) BM 2a Desa Sidomukti	31/12/2008	25.150.000,00
38	Dinas PUPR	4.14.1.6.6	Rehab. talang DI Bone-Bone Kiri Kel. Bone-Bone (keg. op & pemel. Irigasi)	31/12/2010	32.310.000,00
39	Dinas PUPR	4.14.1.6.12	Rehab. lantai jembatan pelayanan & pintu penguras bendung Bone-Bone(P.pemb.jar.irigasi)	31/12/2007	39.365.000,00
Jumlah					13.327.515.000,00
40	RSUD Andi Djemma	3.11.1.06.1	Rehabilitasi Ruang VIP Plamboyan RSUD	28/12/2017	208.509.000,00
JUMLAH					13.536.024.000,00

3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp40.317.308.465,00. dan Rp31.067.213.100,00.

Tabel 41
 Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.067.213.100,00	22.326.342.627,00	13.076.247.262,00	40.317.308.465,00
1	Tanah	-	44.900.000,00	-	44.900.000,00
2	Peralatan dan Mesin	-	6.589.000,00	-	6.589.000,00
3	Gedung dan Bangunan	6.700.393.238,00	15.495.184.738,00	5.271.082.000,00	16.924.495.976,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.366.819.862,00	6.779.668.889,00	7.805.165.262,00	23.341.323.489,00
Jumlah		31.067.213.100,00	22.326.342.627,00	13.076.247.262,00	40.317.308.465,00

Rincian terdapat dalam Lampiran 17.

Pada Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp22.326.342.627,00 yang terdiri dari :

- Reklasifikasi dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp44.900.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.589.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.495.184.738,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.779.668.889,00

Adapun mutasi berkurang sebesar Rp 13.076.247.262,00 adalah reklasifikasi ke Aset Tetap Gudung dan Bangunan.

3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 1.161.564.978.645,33 dan Rp1.030.111.913.460,25.

Tabel 42
Rincian Mutasi Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(185.116.192.239,60)	(35.790.685.416,55)	(3.927.214.013,83)	(216.979.663.642,32)
2	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(164.059.919.089,61)	(19.618.118.689,22)	(2.561.271.643,00)	(181.116.766.135,83)
3	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(680.935.802.131,04)	(71.144.027.499,68)	(115.844.929,00)	(751.963.984.701,72)
4	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	(11.504.564.165,46)	-	(11.504.564.165,46)
Jumlah		(1.030.111.913.460,25)	(138.057.395.770,91)	(6.604.330.585,83)	(1.161.564.978.645,33)

Pada Tahun 2018 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp138.057.395.770,91 yang terdiri dari : Beban Penyusutan Tahun 2018 sebesar Rp111.433.024.810,71, Penyusutan Aset Mutasi sebesar Rp13.402.415.077,00 dan Koreksi Penyusutan sebesar Rp13.221.955.883,20 sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp6.604.330.585,83 yang terdiri dari Penghapusan Penyusutan dari Aset tetap yang dihapus sebesar Rp2.065.060.450,00, Koreksi Pencatatan sebesar Rp719.455.084,83, Mutasi Penyusutan sebesar Rp2.618.208.648,00, Reklas ke Ast Lainnya sebesar Rp1.068.798.358,00 Ekstrakompatabel Penyusutan sebesar Rp132.808.045,00. Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan per 31 Desember 2018 adalah Rp1.275.141.030.802,53

3.1.4 DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak melakukan pembentukan dana cadangan.



3.1.5 ASET LAINNYA

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp10.968.194.957,45 dan Rp79.731.661.296,53 yang terdiri atas:

Tabel 43
Rincian Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara	6.300.000,00	-	-	6.300.000,00
	<i>Penyisihan Piutang Kpd Bendahara/ Mantan Bendahara</i>	<i>(6.300.000,00)</i>	-	-	<i>(6.300.000,00)</i>
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.974.313.691,41	4.419.100,00	36.488.322,00	5.942.244.469,41
	<i>Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</i>	<i>(5.504.954.954,90)</i>	<i>(97.866.050,00)</i>	<i>(16.246.736,70)</i>	<i>(5.586.574.268,20)</i>
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.609.828.500,00	-	-	2.609.828.500,00
4	Aset Tak Berwujud	1.896.413.950,00	339.420.000,00	-	2.235.833.950,00
	<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	<i>(1.144.754.329,00)</i>	<i>(342.115.155,00)</i>	-	<i>(1.486.869.484,00)</i>
5	Aset Lain-lain	126.921.578.992,80	1.166.932.692,00	105.300.190.981,39	22.788.320.703,41
	Aset Rusak Berat	2.817.503.250,17	1.166.932.692,00	-	3.984.435.942,17
	Aset Non Operasional	124.104.075.742,63	-	105.300.190.981,39	18.803.884.761,24
	<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain</i>	<i>(51.020.764.553,78)</i>	<i>(2.277.074.364,48)</i>	<i>(37.763.250.005,09)</i>	<i>(15.534.588.913,17)</i>
	<i>Akm. Penyusutan Aset Rusak Berat</i>	<i>(2.707.218.504,69)</i>	<i>(1.111.546.952,48)</i>	-	<i>(3.818.765.457,17)</i>
	<i>Akm. Penyusutan Aset Non Operasional</i>	<i>(48.313.546.049,09)</i>	<i>(1.165.527.412,00)</i>	<i>(37.763.250.005,09)</i>	<i>(11.715.823.456,00)</i>
	Jumlah Aset Lainnya	79.731.661.296,53	(1.206.283.777,48)	67.557.182.561,60	10.968.194.957,45

3.1.5.1 Piutang Kepada Bendahara/Mantan Bendahara

Piutang Kepada Bendahara/Mantan Bendahara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah Rp6.300.000,00, yang merupakan Penggunaan Sisa Kas atas nama Rannuki (Mantan Bendahara Kecamatan Rampi TA. 2003)

3.1.5.2 Tuntutan Perbendaharaan–Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan –Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah Rp5.942.244.469,41. Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat mutase bertambah sebesar Rp4.419.100,00 berkurang sebesar Rp36.488.322,00. Secara rinci disajikan dalam *Lampiran 18*.

3.1.5.3 Kemitraan dengan pihak ketiga

Berdasarkan perjanjian kerja sama bersyarat Nomor 01/PK/LU/II/2002 tanggal 9 Februari 2002 dan perjanjian tambahan (amandemen) Nomor 05/PK/LU/II/2003 tanggal 22 Januari 2003 antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dengan PT Kemal Jaya tentang Pembangunan Pasar Sentral Masamba, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan penyeteroran modal sebesar Rp2.609.828.500,00 yang terdiri dari tanah seluas 55.050 m² senilai Rp1.101.000.000,00 dan bangunan senilai Rp1.508.828.500,00. Dari kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memperoleh areal parkir, MCK, pos keamanan, bak/tong sampah, 2 unit kantor pasar, mushalla, halaman/pelataran, jalanan, drainase, taman serta 2 blok bangunan lods basah sedangkan PT Kemal Jaya memperoleh ruko, toko dan kios. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 25 tahun atas bangunan ruko, toko dan kios yang menjadi hak PT Kemal Jaya. Perjanjian kerja sama ini berakhir pada saat berakhirnya HGB atas bangunan ruko, toko dan kios tersebut. Perjanjian kerja sama ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 02 tanggal 9 Februari 2002 Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 44
Rincian Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per	Bertambah	Berkurang	Per	Ket
		31 Des 2017			31 Des 2018	
1	PT Kemal Jaya (Pembangunan Pasar Sentral Masamba) Tahun 2003					
	Tanah 55.050 m ²	1.101.000.000,00			1.101.000.000,00	
	Bangunan	1.508.828.500,00			1.508.828.500,00	
	Jumlah	2.609.828.500,00	-	-	2.609.828.500,00	

3.1.5.4 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud sebesar Rp2.235.833.950,00 merupakan aplikasi yang di gunakan oleh Pemerintah Daerah pada beberapa SKPD. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 45
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per.31. Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per.31. Des 2018	Ket
	Aset Tak Terwujud	1.896.413.950,00	339.420.000,00		2.235.833.950,00	
1	Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah	108.723.000,00			108.723.000,00	DPPKAD
2	Software Sistem Informasi Potensi Daerah Berbasis Website	59.700.000,00			59.700.000,00	BPPTSP & PM
3	SIM-PBB P2	748.550.000,00			748.550.000,00	DPPKAD
4	Master Plan Pariwisata	76.175.000,00			76.175.000,00	Dinas Mudora
5	Sistem Informasi Rumah Sakit	135.000.000,00			135.000.000,00	RSUD
6	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan	106.800.000,00			106.800.000,00	BPPTSP & PM
7	Aplikasi Profil Kependudukan	48.400.000,00			48.400.000,00	Dinas Capil



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018	Ket
8	E-RFK	44.000.000,00			44.000.000,00	Bappeda
9	SP2D Online	84.500.000,00			84.500.000,00	BPKAD
10	System Software (Clie)	26.748.260,00			26.748.260,00	Disdik
11	System Software (Server)	36.333.220,00			36.333.220,00	Disdik
12	MS Office	222.384.470,00			222.384.470,00	Disdik
13	Aplikasi & Cloud data pegawai absensi online (setda)	199.100.000,00			199.100.000,00	Setda
14	Aplikasi Kependudukan (e-Report)		34.970.000,00		34.970.000,00	Disdukcapil
15	Aplikasi Web Base Kependudukan (Website)		45.470.000,00		45.470.000,00	Disdukcapil
16	Aplikasi SIM Hibah dan Bansos		49.500.000,00		49.500.000,00	BPKAD
17	Aplikasi Data Base Pengawasan Bangunan		109.780.000,00		109.780.000,00	DPUPR
18	Aplikasi Data Keciptakarya		99.700.000,00		99.700.000,00	DPUPR
	Amortisasi	(1.144.754.329,00)	(342.115.155,00)		(1.486.869.484,00)	
1	Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah	(108.723.000,00)			(108.723.000,00)	
2	Software Sistem Informasi Potensi Daerah Berbasis Website	(57.710.000,00)	(1.990.000,00)		(59.700.000,00)	
3	SIM-PBB P2	(623.791.667,00)	(124.758.333,00)		(748.550.000,00)	
4	Master Plan Pariwisata	(68.557.500,00)	(7.617.500,00)		(76.175.000,00)	
5	Sistem Informasi Rumah Sakit	(110.250.000,00)	(24.750.000,00)		(135.000.000,00)	
6	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan	(85.440.000,00)	(21.360.000,00)		(106.800.000,00)	
7	Aplikasi Profil Kependudukan	(15.326.667,00)	(9.680.000,00)		(25.006.667,00)	
8	E-RFK	(9.533.333,00)	(8.800.000,00)		(18.333.333,00)	
9	SP2D Online	(8.450.000,00)	(16.900.000,00)		(25.350.000,00)	
10	System Software (Clie)	(2.229.022,00)	(5.349.652,00)		(7.578.674,00)	
11	System Software (Server)	(3.027.768,00)	(7.266.644,00)		(10.294.412,00)	
12	MS Office	(18.532.039,00)	(44.476.894,00)		(63.008.933,00)	
13	Aplikasi & Cloud data pegawai absensi online (setda)	(33.183.333,00)	(39.820.000,00)		(73.003.333,00)	
14	Aplikasi Kependudukan (e-Report)	-	(5.828.333,00)		(5.828.333,00)	
15	Aplikasi Web Base Kependudukan (Website)	-	(7.578.333,00)		(7.578.333,00)	
16	Aplikasi SIM Hibah dan Bansos	-	(3.300.000,00)		(3.300.000,00)	
17	Aplikasi Data Base Pengawasan Bangunan	-	(10.977.800,00)		(10.977.800,00)	
18	Aplikasi Data Keciptakarya	-	(1.661.666,00)		(1.661.666,00)	
	Jumlah	751.659.621,00	(2.695.165,00)		748.964.456,00	

Terdapat mutasi bertambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp339.420.000,00 berupa, Aplikasi Kependudukan dan Web pada Dinas Kependudukan dan Capil, Aplikasi SIM Hibah dan Bansos pada BPKAD, dan Aplikasi Pengawasan Bangunan serta Aplikasi Data Ciptakarya pada Dinas PUPR lampiran 19.



3.1.5.5 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain sebesar Rp7.253.731.790,24 berupa Aset Rusak berat dan Aset Non Operasional. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 46
Rincian Mutasi Aset Lain - Lain
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Aset Lain-lain	126.921.578.992,80	1.166.932.692,00	105.300.190.981,39	22.788.320.703,41
	- Aset Rusak Berat	2.817.503.250,17	1.166.932.692,00	-	3.984.435.942,17
	- Aset Non Operasional	124.104.075.742,63	-	105.300.190.981,39	18.803.884.761,24
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain	(51.020.764.553,78)	(2.277.074.364,48)	(37.763.250.005,09)	(15.534.588.913,17)
	- Akm.Penyusutan Aset Rusak Berat	(2.707.218.504,69)	(1.111.546.952,48)		(3.818.765.457,17)
	- Akm. Penyusutan Aset Non Operasional	(48.313.546.049,09)	(1.165.527.412,00)	(37.763.250.005,09)	(11.715.823.456,00)
	Jumlah Aset Lainnya	75.900.814.439,02	(1.110.141.672,48)	67.536.940.976,30	7.253.731.790,24

Aset Lain-Lain sebesar Rp22.788.320.703,41 terdiri atas Aset Rusak Berat sebesar Rp3.984.435.942,17 dan Aset Non Operasional sebesar Rp18.803.884.761,24

Terdapat Mutasi bertambah Aset Lain-Lain sebesar Rp1.166.932.692,00 yang merupakan reklasifikasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya.

Terdapat Mutasi berkurang Aset Lain-Lain sebesar Rp105.300.190.981,39 yang merupakan asset non operasional yang telah dihibahkan (diserahkan) pengelolaannya kepada masyarakat.

Daftar Aset Rusak Berat sebesar Rp3.984.435.942,17 rincian sebagai berikut:

Tabel 47
Mutasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat
(dalam rupiah)

No.	SKPD	Per 31 Des 2017	Mutasi		Per 31 Des 2018
			Bertambah	Berkurang	
1	Sekretariat DPRD	17.500.000,00			17.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	175.816.661,00			175.816.661,00
3	Dinas Perhubungan	475.129.670,17			475.129.670,17
4	Dinas Kesehatan	364.029.744,00	364.430.417,00		728.460.161,00
5	Dinas Pendidikan	137.859.000,00			137.859.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Capil	12.000.000,00			12.000.000,00
7	DTPHP	40.761.000,00			40.761.000,00
8	BPKAD	76.500.000,00			76.500.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	167.380.875	169.218.625,00		336.599.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.500.000,00			3.500.000,00
11	Kecamatan Sabbang	14.500.000,00			14.500.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Per 31 Des 2017	Mutasi		Per 31 Des 2018
			Bertambah	Berkurang	
12	Kecamatan Rongkong	25.500.000,00			25.500.000,00
13	Kecamatan Seko	38.900.000,00			38.900.000,00
14	Kecamatan Rampi	6.000.000,00			6.000.000,00
15	Inspektorat	138.950.000,00			138.950.000,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	98.382.750,00			98.382.750,00
17	Kecamatan Mappedeceng	21.870.000,00			21.870.000,00
18	Dinas Perikanan	33.410.000,00			33.410.000,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	220.351.095,00			220.351.095,00
20	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa	30.124.000,00			30.124.000,00
21	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	32.371.455,00			32.371.455,00
22	Dinas Sosial	26.500.000,00			26.500.000,00
23	Kecamatan Masamba	35.100.000,00			35.100.000,00
24	Kecamatan Malangke Barat	31.450.000,00			31.450.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	144.000.000,00	13.500.000,00		157.500.000,00
26	Sekretariat Daerah	127.470.000,00	299.126.400,00		426.596.400,00
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	17.147.000,00	320.657.250,00		337.804.250,00
28	RSUD Andi Djemma	305.000.000,00			305.000.000,00
Jumlah		2.817.503.250,17	1.166.932.692,00		3.984.435.942,17

Rincian lebih detail terdapat dalam Lampiran 20.

Daftar Aset Non Operasional sebesar
Rp18.803.884.761,24 rincian sebagai berikut:

Tabel 48
Mutasi Aset Lainnya - Aset Non Operasional
(dalam rupiah)

No	SKPD	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Dinas Pekerjaan Umum	26.959.728.877,24		13.327.515.000,00	13.632.213.877,24
2	Dinas Pendidikan	74.084.304.747,03		72.767.982.567,03	1.316.322.180,00
3	DTPHP	10.471.243.998,36		10.471.243.998,36	-
4	Dinas Perikanan	1.767.886.559,00		1.767.886.559,00	-
5	BPKAD	6.965.562.857,00		6.965.562.857,00	-
6	Badan Pendapatan Daerah	2.025.889.304,00		-	2.025.889.304,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.829.459.400,00		-	1.829.459.400,00
Jumlah Non Operasional		124.104.075.742,63		105.300.190.981,39	18.803.884.761,24
1	Dinas Pekerjaan Umum	(17.363.444.816,00)	(1.018.387.739,00)	(10.600.166.577,00)	(7.781.665.978,00)
2	Dinas Pendidikan	(23.186.991.512,09)		(21.870.669.332,09)	(1.316.322.180,00)
3	DTPHP	(3.847.610.127,00)		(3.847.610.127,00)	-
4	Dinas Perikanan	(583.548.358,00)		(583.548.358,00)	-
5	BPKAD	(861.255.611,00)		(861.255.611,00)	-
6	Badan Pendapatan Daerah	(2.025.889.304,00)			(2.025.889.304,00)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	S K P D	Per 31 Des. 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
7	Dinas Lingkungan Hidup	(444.806.321,00)	(147.139.673,00)		(591.945.994,00)
	Jumlah Penyusutan	(48.313.546.049,09)	(1.165.527.412,00)	(37.763.250.005,09)	(11.715.823.456,00)
	Jumlah Aset Non Operasional	75.790.529.693,54	(1.165.527.412,00)	67.536.940.976,30	7.088.061.305,24

Terdapat Mutasi berkurang Aset Non Operasional sebesar Rp105.300.190.981,39 yang merupakan aset non operasional yang telah dihibahkan (diserahkan) pengelolaannya kepada masyarakat, dengan rincian terdapat dalam **Lampiran 21**.

3.1.6 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp24.858.682.328,77 dan Rp14.737.244.770,15 yang terdiri atas:

Tabel 49
Rincian Kewajiban
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Kewajiban Jangka Pendek	14.737.244.770,15	24.202.528.762,21	14.081.091.203,59	24.858.682.328,77
2	Kewajiban Jangka Panjang	-			-
	Jumlah Kewajiban	14.737.244.770,15	24.202.528.762,21	14.081.091.203,59	24.858.682.328,77

3.1.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 dan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp24.858.682.328,77 dan Rp14.737.244.770,15 yang terdiri atas:

Tabel 50
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.788.215,33	601.041,00	2.788.175,33	601.081,00
2	Utang Pajak	4.809.750,00	4.870.224,00	2.188.500,00	7.491.474,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	256.243.033,00	215.233.490,27	256.243.033,00	215.233.490,27
4	Utang Belanja	14.473.403.771,82	22.127.980.206,94	13.819.871.495,26	22.781.512.483,50
5	Utang Transfer	-	1.853.843.800,00	-	1.853.843.800,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	14.737.244.770,15	24.202.528.762,21	14.081.091.203,59	24.858.682.328,77

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspem, dan Taperum. Utang PFK



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp601.081,00 dan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.788.215,33 rincian utang PFK sebagai berikut:

Tabel 51
 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	PPh 21	2.463.039,33	601.041,00	2.463.039,33	601.041,00
2	PPh 22	42.409,00	-	42.409,00	-
3	PPN	282.767,00	-	282.727,00	40,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.788.215,33	601.041,00	2.788.175,33	601.081,00

2) Utang Pajak

Utang Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.491.474,00 yang merupakan Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran atas belanja makanan dan minum dan belum disetorkan ke Kas Daerah

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp215.233.490,27 yang merupakan Pendapatan dari Pajak Reklame sebesar Rp194.233.490,27 dan Pendapatan PAD yang sah sebesar Rp21.000.000,00 yang sampai dengan per 31 Desember 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara belum memberikan jasa seluruhnya. Adapun rincian dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

4) Utang Belanja

Utang Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.781.512.483,50 dan Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp14.473.403.771,82 yang terdiri atas:

Tabel 52
 Rincian Utang Belanja
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Bertambah	Berkurang	Per 31 Des 2018
1	Obat, Alkes dan BPJS	2.295.296.678,00	5.328.493.361,00	2.295.296.678,00	5.328.493.361,00
2	Belanja Modal	9.339.437.880,26	10.582.479.880,50	8.873.034.039,26	11.048.883.721,50
3	Belanja Hibah	342.485.107,00	67.955.962,00	338.805.419,00	71.635.650,00
4	JKN dan Pelayanan BPJS	587.436.713,00	536.893.350,00	585.652.488,00	538.677.575,00
5	Belanja Pegawai	1.083.121.539,56	5.114.532.321,44	1.223.123.306,00	4.974.530.555,00
6	Pajak Kendaraan	146.955.892,00	129.089.715,00	33.414.583,00	242.631.024,00
7	Jasa Kantor	678.669.962,00	576.660.597,00	678.669.962,00	576.660.597,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.473.403.771,82	22.336.105.186,94	14.027.996.475,26	22.781.512.483,50



Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada *lampiran 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g.*

5) Utang Transfer

Untuk Tahun 2018 masih terdapat Utang Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sampai dengan per 31 Desember 2018 belum ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Pemerintah Desa sebesar Rp 1.853.843.800,00, yang terdiri :

- Desa Onondowa Kec. Rampi sebesar Rp311.962.400,00
- Desa Leboni Kec. Rampi sebesar Rp292.059.600,00
- Desa Dodolo Kec. Rampi sebesar Rp282.654.000,00
- Desa Palanan Kec. Baebunta sebesar Rp684.803.000,00
- Desa Polewali Kec. Baebunta sebesar Rp282.364.800,00

3.1.6.2 Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki perjanjian yang menimbulkan utang jangka panjang.

3.1.7 EKUITAS

Nilai Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.335.711.678.453,73

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan Operasional pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.170.334.847.069,31 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang meliputi Beban Operasi dan Beban Transfer. Realisasi Beban pada tahun 2018 adalah sebesar Rp999.573.388.304,77 yang terdiri dari : Beban Operasi sebesar Rp928.835.791.195,77 dan Beban Transfer sebesar Rp70.737.597.109,00.

Beban Operasi terdiri atas :

- Beban Pegawai sebesar	Rp	443.904.849.217,00
- Beban Barang sebesar	Rp	195.898.212.354,61
- Beban Jasa sebesar	Rp	82.712.086.624,05
- Beban Pemeliharaan sebesar	Rp	5.931.914.361,00
- Beban Perjalanan Dinas sebesar	Rp	65.373.789.933,00
- Beban Bunga sebesar	Rp	0,00
- Beban Subsidi sebesar	Rp	100.000.000,00
- Beban Hibah sebesar	Rp	13.361.490.620,00
- Beban Bantuan Sosial sebesar	Rp	6.086.704.400,00
- Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar	Rp	111.316.204.386,71



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar	Rp	1.241.544.902,48
- Beban Amortisasi sebesar	Rp	342.115.155,00
- Beban Penyisihan Piutang sebesar	Rp	2.298.796.191,93
- Beban Penyisihan TGR	Rp	97.866.050,00
- Beban Lain-Lain sebesar	Rp	170.217.000,00

Beban Transfer terdiri atas :

- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar	Rp	70.737.597.109,00
---	----	-------------------

Berdasarkan penerimaan Pendapatan - LO sebesar Rp 1.170.334.847.069,31 dan realisasi Beban - LO sebesar Rp999.573.388.304,77 sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengalami Surplus dari Operasi sebesar Rp170.761.458.764,54.

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp22.646.608.612,11) sehingga Surplus Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp148.114.850.152,43.

4.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.170.334.847.069,31 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 53
Rincian Pendapatan - LO
(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	PENDAPATAN	-			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	20.085.216.776,73	17.163.096.322,80	2.922.120.453,93	17,03
4	Pendapatan Retribusi Daerah	11.183.195.443,00	9.647.480.464,00	1.535.714.979,00	15,92
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.738.203.195,00	3.981.858.954,40	1.756.344.240,60	44,11
6	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya	90.891.229.312,58	122.409.420.854,93	(31.518.191.542,35)	(25,75)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	127.897.844.727,31	153.201.856.596,13	(25.304.011.868,82)	(16,52)
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	11.617.170.140,00	13.953.149.550,00	(2.335.979.410,00)	(16,74)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.915.566.810,00	4.068.658.399,00	846.908.411,00	20,82
13	Dana Alokasi Umum	655.693.773.000,00	653.395.912.000,00	2.297.861.000,00	0,35
14	Dana Alokasi Khusus	255.514.760.202,00	241.266.392.667,00	14.248.367.535,00	5,91
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	927.741.270.152,00	912.684.112.616,00	15.057.157.536,00	1,65
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	8.750.000.000,00	7.500.000.000,00	1.250.000.000,00	16,67



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	8.750.000.000,00	7.500.000.000,00	1.250.000.000,00	16,67
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.356.174.217,00	31.596.879.557,00	(240.705.340,00)	(0,76)
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	17.674.607.062,00	17.491.669.934,00	182.937.128,00	1,05
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	49.030.781.279,00	49.088.549.491,00	(57.768.212,00)	(0,12)
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	985.522.051.431,00	969.272.662.107,00	16.249.389.324,00	1,68
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	11.850.442.776,00	2.664.669.134,50	9.185.773.641,50	344,72
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	45.064.508.135,00	136.961.285.600,00	(91.896.777.465,00)	(67,10)
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)	56.914.950.911,00	139.625.954.734,50	(82.711.003.823,50)	(59,24)
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	1.170.334.847.069,31	1.262.100.473.437,63	(91.765.626.368,32)	(7,27)

4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Per 31 Desember 2018 sebesar Rp127.897.844.727,31 yang terdiri dari komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 54
 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO
 (dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Daerah	20.085.216.776,73	17.163.096.322,80	2.922.120.453,93	17,03
	Pajak Hotel	196.405.002,00	170.995.700,00	25.409.302,00	14,86
	Pajak Restoran	1.802.815.150,00	1.502.303.025,80	300.512.124,20	20,00
	Pajak Hiburan	14.024.000,00	12.640.000,00	1.384.000,00	10,95
	Pajak Reklame	372.865.142,73	151.348.267,00	221.516.875,73	146,36
	Pajak Penerangan Jalan	8.127.868.309,00	6.893.225.795,00	1.234.642.514,00	17,91
	Pajak Galian Golongan C	4.179.871.000,00	3.514.497.000,00	665.374.000,00	18,93
	Pajak Parkir	-	7.806.978,00	(7.806.978,00)	(100,00)
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	880.460.150,00	627.351.302,00	253.108.848,00	40,35
	Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan	4.510.908.023,00	4.282.928.255,00	227.979.768,00	5,32
2	Retribusi Daerah	11.183.195.443,00	9.647.480.464,00	1.535.714.979,00	15,92
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.871.034.644,00	5.822.209.473,00	1.048.825.171,00	18,01
	Retribusi Pelayanan Persampahan	181.800.000,00	142.670.000,00	39.130.000,00	27,43
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	320.048.000,00	384.502.000,00	(64.454.000,00)	(16,76)
	Retribusi Pelayanan Pasar	808.518.600,00	771.255.810,00	37.262.790,00	4,83
	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	151.160.500,00	-	151.160.500,00	100,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Jenis Pendapatan	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	366.960.000,00	402.067.150,00	(35.107.150,00)	(8,73)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan	6.800.000,00	-	6.800.000,00	100,00
	Retribusi Tempat Pelelangan Ternak	22.060.000,00	20.080.000,00	1.980.000,00	9,86
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.087.175.000,00	833.601.000,00	253.574.000,00	30,42
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	95.080.000,00	40.160.000,00	54.920.000,00	136,75
	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Setelah Dipotong	-	40.160.000,00	(40.160.000,00)	(100,00)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	80.000.000,00	73.380.000,00	6.620.000,00	9,02
	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	206.977.000,00	138.600.000,00	68.377.000,00	49,33
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	803.246.599,00	673.466.991,00	129.779.608,00	19,27
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	140.891.900,00	(140.891.900,00)	(100,00)
	Retribusi Izin Trayek	1.450.000,00	3.990.000,00	(2.540.000,00)	(63,66)
	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Uang	16.637.500,00	-	16.637.500,00	100,00
	Retribusi Pengendalian Jasa Telekomunikasi	164.247.600,00	160.446.140,00	3.801.460,00	100,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.738.203.195,00	3.981.858.954,40	1.756.344.240,60	44,11
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sulsel	5.062.441.567,00	2.951.564.299,40	2.110.877.267,60	71,52
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM	675.761.628,00	1.030.294.655,00	(354.533.027,00)	(34,41)
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.891.229.312,58	122.409.420.854,93	(31.518.191.542,35)	(25,75)
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	18.017.950,00	-	18.017.950,00	100,00
	Penerimaan Jasa Giro	1.813.144.044,00	2.393.481.218,50	(580.337.174,50)	(24,25)
	Pendapatan Bunga	2.765.917.768,00	2.770.205.398,55	(4.287.630,55)	(0,15)
	Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-	-
	Pendapatan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.160.100,00	89.100,00	7.071.000,00	7.936,03
	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelak. Pekerjaan	399.451.938,06	267.555.565,00	131.896.373,06	49,30
	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	224.702.200,00	-	224.702.200,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian	1.053.656.956,38	557.648.406,89	496.008.549,49	88,95
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	68.920.732.626,00	60.057.915.226,99	8.862.817.399,01	14,76
	Pendapatan Administratif Dana BOS	-	41.821.876.100,00	(41.821.876.100,00)	(100,00)
	Pendapatan Administratif Dana JKN	15.519.450.300,00	14.517.649.839,00	1.001.800.461,00	6,90
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	168.995.430,14	-	168.995.430,14	100,00
	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	23.000.000,00	(23.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	127.897.844.727,31	153.201.856.596,13	(25.304.011.868,82)	(16,52)

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional sebesar Rp20.085.216.776,73 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA sebesar Rp19.535.300.198,00 terdapat selisih sebesar Rp549.916.578,73 hal ini disebabkan oleh :

Selisih lebih :

- Mutasi Bertambah Piutang PBB sebesar Rp717.646.175,00
- Pendapatan Diterima Dimuka (Tahun 2017) sebesar Rp256.243.033,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Mutasi Bertambah Pajak Reklame sebesar Rp1.761.875,00

Selisih kurang :

- Pelunasan Piutang PBB-P2 sebesar Rp226.894.314,00
- Pelunasan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp2.715.000,00
- Pelunasan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.813.600,00
- Pelunasan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp78.100,00
- Pendapatan Diterima dimuka (Pajak Reklame) sebesar Rp194.233.490,27

Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional sebesar Rp11.183.195.443,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA sebesar Rp11.240.548.227,00 terdapat selisih sebesar Rp57.352.784,00 hal ini disebabkan oleh :

Selisih lebih :

- Penambahan Piutang Retribusi Jasa Telekomunikasi sebesar Rp24.490.400,00

Selisih kurang :

- Penyetoran Kas di Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Tahun 2017 sebesar Rp48.696.000,00
- Penyetoran Kas di Bendahara Penerima Dinas Budpar Tahun 2017 sebesar Rp2.718.000,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Pasar sebesar Rp2.974.284,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp14.749.900,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 12.705.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional sebesar Rp 959.093.628,00 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada LRA sebesar Rp 1.707.466.202,00 terdapat selisih sebesar Rp4.030.736.993,00 hal ini disebabkan selisih lebih oleh :

- Laba dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebesar Rp675.761.628,00.
- Dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sul-Sel untuk Tahun 2018 sebesar Rp4.779.109.567,00

Selisih kurang :

- Dividen dari Bank Sulselbar Tahun 2017 sebesar Rp1.424.134.202,00

Lain-Lain PAD Yang Sah pada Laporan Operasional sebesar Rp90.786.290.554,52 sedangkan Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA sebesar Rp80.799.757.850,81 terdapat selisih sebesar Rp10.091.471.461,77 hal ini disebabkan oleh :

Selisih lebih :

- Mutasi Bertambah Piutang TGR sebesar Rp 4.419.100,00
- Mutasi Bertambah Piutang BPJS-RSUD Andi Jemma sebesar Rp18.418.416.620,00
- Jasa Giro pada Bendahara JKN yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp661.861,00
- Piutang Lain-Lain PAD – Sewa Tempat sebesar Rp1.200.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Piutang Lain-Lain - Denda Keterlambatan sebesar Rp180.725.158,06

Selisih kurang :

- Pelunasan Piutang TGR sebesar Rp36.488.322,00
- Pelunasan Piutang Lain - Lain - BPJS RSUD Andi Djemma sebesar Rp7.751.519.248,00
- Saldo Awal BLUD (sisa kas 2017) yang diakui sebagai Pendapatan RSUD Andi Djemma sebesar Rp155.147.009,89
- Saldo Awal JKN (sisa kas 2017) yang diakui sebagai Pendapatan Dinas Kesehatan sebesar Rp448.311.153,40
- Penyetoran Jasa Giro dana JKN T.A 2017 sebesar Rp3.097.259,00
- Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp21.000.000,00
- Penyetoran Uang Muka Belanja Dinas PU Tahun 2017 sebesar Rp13.656.885,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp8.945.000,00
- Pelunasan Piutang Lain-Lain - Kelebihan Pembayaran Gaji Pensiun ASN sebesar Rp75.786.400,00

4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp985.522.051.431,00 yang terdiri dari komponen penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari Provinsi dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 55
Rincian Pendapatan Transfer-LO
(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/PENURUNAN	%
A	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	927.741.270.152,00	918.161.549.616,00	9.579.720.536,00	1,04
1	Bagi Hasil Pajak	11.617.170.140,00	13.953.149.550,00	(2.335.979.410,00)	(16,74)
	Pajak Bumi dan Bangunan	-	6.729.595.430,00	(6.729.595.430,00)	(100,00)
	Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 atas Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	4.667.854.814,00	6.662.945.447,00	(1.995.090.633,00)	(29,94)
	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	380.156.845,00	125.106.300,00	255.050.545,00	203,87
	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	2.984.280.974,00	-	2.984.280.974,00	100,00
	Cukai Hasil Tembakau	219.833.000,00	234.390.056,00	(14.557.056,00)	(6,21)
	Bagi Hasil PBB Pro Rata	3.235.257.970,00	-	3.235.257.970,00	100,00
	Upah Pungut PBB Migas dan PBB Perkebunan	129.786.537,00	201.112.317,00	(71.325.780,00)	100,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA	4.915.566.810,00	4.068.658.399,00	846.908.411,00	20,82
	Dari Provinsi atas Sumber Daya Hutan	27.568.562,00	8.997.687,00	18.570.875,00	206,40
	Iuran Tetap (Land Renf)	571.309.897,00	633.949.241,00	(62.639.344,00)	(9,88)
	Iuran Eksploitasi (Royalti)	2.752.536.010,00	1.840.292.571,00	912.243.439,00	49,57
	Pungutan Pengusaha Perikanan	701.234.591,00	447.937.200,00	253.297.391,00	56,55
	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	-	664.379,00	(664.379,00)	(100,00)
	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	74.650,00	-	74.650,00	100,00
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	862.843.100,00	1.136.817.321,00	(273.974.221,00)	(24,10)
3	Dana Alokasi Umum	655.693.773.000,00	658.873.349.000,00	(3.179.576.000,00)	(0,48)
4	Dana Alokasi Khusus	255.514.760.202,00	241.266.392.667,00	14.248.367.535,00	5,91
	DAK Bidang Pendidikan	10.599.509.000,00	9.552.904.720,00	1.046.604.280,00	10,96



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Pendapatan	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/PENURUNAN	%
	DAK Bidang Kesehatan	45.606.419.789,00	34.188.294.147,00	11.418.125.642,00	33,40
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	79.549.148.000,00	68.991.046.000,00	10.558.102.000,00	15,30
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	11.981.622.118,00	8.988.400.000,00	2.993.222.118,00	33,30
	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	770.691.763,00	-	770.691.763,00	100,00
	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	2.050.000.000,00	-	2.050.000.000,00	100,00
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.425.511.000,00	1.527.856.150,00	(102.345.150,00)	(6,70)
	DAK Bidang Pertanian	4.208.581.184,00	4.121.630.550,00	86.950.634,00	2,11
	DAK Bidang Keluarga Berencana	553.321.800,00	537.157.000,00	16.164.800,00	3,01
	DAK Bidang Perdagangan	-	1.775.055.000,00	(1.775.055.000,00)	(100,00)
	DAK Bidang Pariwisata	1.074.000.000,00	-	1.074.000.000,00	100,00
	DAK Bidang Sanitasi	6.784.000.000,00	-	6.784.000.000,00	100,00
	Bantuan Operasional Kesehatan	15.302.446.111,00	7.624.388.000,00	7.678.058.111,00	100,00
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	882.825.000,00	1.041.750.000,00	(158.925.000,00)	100,00
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	61.979.459.020,00	62.638.608.900,00	(659.149.880,00)	100,00
	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.144.064.230,00	3.568.000.000,00	576.064.230,00	100,00
	Bantuan Operasional KB	3.386.039.500,00	704.760.000,00	2.681.279.500,00	100,00
	Bantuan Operasional Persalinan (Jampersal)	-	846.722.000,00	(846.722.000,00)	100,00
	Dana Akreditasi Puskesmas	-	660.070.000,00	(660.070.000,00)	100,00
	Tunjangan Khusus Guru	4.114.655.000,00	2.899.543.200,00	1.215.111.800,00	100,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.102.466.687,00	1.103.675.000,00	(1.208.313,00)	100,00
	Penyelesaian DAK Fisik 2016	-	30.496.532.000,00	(30.496.532.000,00)	100,00
B	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	8.750.000.000,00	7.500.000.000,00	1.250.000.000,00	16,67
1	Dana Penyesuaian	8.750.000.000,00	7.500.000.000,00	1.250.000.000,00	16,67
	Dana Penyesuaian	8.750.000.000,00	7.500.000.000,00	1.250.000.000,00	16,67
C	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	49.030.781.279,00	49.088.549.491,00	(57.768.212,00)	(0,12)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.356.174.217,00	31.596.879.557,00	(240.705.340,00)	(0,76)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	31.356.174.217,00	31.596.879.557,00	(240.705.340,00)	(0,76)
2	Dana Bagi Hasil Lainnya	17.674.607.062,00	17.491.669.934,00	182.937.128,00	1,05
	Dana Bagi Hasil Lainnya	17.674.607.062,00	17.491.669.934,00	182.937.128,00	1,05
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	985.522.051.431,00	974.750.099.107,00	10.771.952.324,00	1,11

Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional sebesar Rp973.518.563.884,00 sedangkan Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA sebesar Rp978.834.876.341,00 terdapat selisih sebesar Rp5.316.312.457,00 hal ini disebabkan oleh :

Selisih Tambah :

- Piutang Bagi Hasil Pajak – Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.850.773.618,00
- Piutang Bagi Hasil Lainnya – Pajak Rokok sebesar Rp3.152.713.929,00

Selisih kurang :

- Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar sebesar Rp2.481.821.949,00
- Penerimaan Piutang Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp2.834.490.508,00

4.1.3 LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp56.914.950.911,00 dengan perincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 56
Rincian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hibah	11.850.442.776,00	2.664.669.134,50	9.185.773.641,50	344,72
2	Pendapatan Lainnya	45.064.508.135,00	136.961.285.600,00	(91.896.777.465,00)	(67,10)
	Bantuan Keuangan Propinsi	-	4.441.189.600,00	(4.441.189.600,00)	(100,00)
	Pendapatan Lainnya	45.064.508.135,00	132.520.096.000,00	(87.455.587.865,00)	(65,99)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	56.914.950.911,00	139.625.954.734,50	(82.711.003.823,50)	(59,24)

Pendapatan Hibah pada Laporan Operasional sebesar Rp11.850.442.776,00 sedangkan Pendapatan Hibah pada LRA sebesar Rp1.836.000.000,00 terdapat selisih sebesar Rp10.014.442.776,00 hal ini disebabkan oleh :

Selisih lebih :

- Hibah Pemerintah Pusat berupa Aset Tetap dan Obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.064.870,00
- Hibah Pemerintah Pusat berupa Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.001.835.206,00
- Hibah Pemerintah Pusat berupa Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.898.539.000,00
- Hibah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berupa Aset Tetap dan Obat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp533.726.700,00
- Hibah Pemerintah Pusat berupa Aset Tetap pada Dinas P2KUKM sebesar Rp3.485.280.000,00
- Hibah Pemerintah Pusat berupa Blanko KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp73.997.000,00

Pendapatan Lainnya pada Laporan Operasional sebesar Rp56.914.950.911,00 sedangkan Pendapatan LRA sebesar Rp188.871.054.535,00, terdapat selisih sebesar Rp143.806.546.400,00, hal ini disebabkan oleh :

Selisih Kurang :

- Transfer Dana Desa sebesar Rp143.801.788.000,00
- Saldo Awal dari Bendahara BOS sebesar Rp4.758.400,00

4.2 BEBAN DAN TRANSFER

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jumlah Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp 999.573.388.304,77 dengan rincian beban sebagai berikut :

4.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 928.835.791.195,77 yang terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp443.904.849.217,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 57
Rincian Beban Pegawai
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Gaji dan Tunjangan	293.265.334.409,00	306.052.059.073,00	(12.786.724.664,00)	(4,18)
2	Tambahan Penghasilan	127.506.307.275,00	99.779.941.184,00	27.726.366.091,00	27,79
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.731.707.842,00	3.780.600.000,00	4.951.107.842,00	130,96
4	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	164.512.774,00	-	164.512.774,00	100,00
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	4.809.600.000,00	-	4.809.600.000,00	100,00
6	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	50.000.000,00	1.098.824.891,56	(1.048.824.891,56)	(95,45)
7	Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.266.750,00	164.302.580,00	(155.035.830,00)	(94,36)
8	Insentif Pungutan Retribusi Daerah	94.891.585,00	-	94.891.585,00	100,00
9	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.560.000,00	-	201.560.000,00	100,00
10	Belanja Iuran Asuransi PNSD	8.805.918.582,00	-	8.805.918.582,00	100,00
11	Uang Lembur	265.750.000,00	1.434.311.750,00	(1.168.561.750,00)	(81,47)
	Jumlah Beban Pegawai	443.904.849.217,00	412.310.039.478,56	31.594.809.738,44	7,66

Beban Pegawai pada Laporan Operasional adalah sebesar Rp443.904.849.217,00 sedangkan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp446.264.057.716,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh:

Selisih lebih :

- Mutasi Bertambah Utang Pegawai sebesar Rp.4.974.530.555,00

Selisih kurang :

- Honorarium PNS yang di reklas ke Beban Jasa sebesar Rp 6.110.615.748,00
- Pelunasan Hutang Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp1.223.123.306,00

4.2.1.2 Beban Barang

Beban Barang Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp 195.690.087.374,61 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 58
Rincian Beban Persediaan
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.952.324.816,00	4.454.943.315,00	497.381.501,00	11,16
2	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	990.108.093,00	1.478.533.550,00	(488.425.457,00)	(33,03)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
3	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	28.016.500,00	40.824.400,00	(12.807.900,00)	(31,37)
4	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	495.192.451,00	408.203.170,00	86.989.281,00	21,31
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	223.735.087,00	155.311.510,00	68.423.577,00	44,06
6	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-	5.245.000,00	(5.245.000,00)	(100,00)
7	Belanja Pengisian Tabung Gas	23.775.000,00	26.604.000,00	(2.829.000,00)	(10,63)
8	Belanja Bendera, Spanduk, Umbul - Umbul dan Sejenisnya	66.228.200,00	24.570.500,00	41.657.700,00	169,54
9	Belanja Bahan Baku Bangunan	765.595.110,00	1.164.330.963,00	(398.735.853,00)	(34,25)
10	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	493.689.750,00	133.830.100,00	359.859.650,00	268,89
11	Belanja Bibit Ternak	35.850.000,00	20.000.000,00	15.850.000,00	79,25
12	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.293.681.429,56	5.798.973.262,26	(505.291.832,70)	(8,71)
13	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	781.006.450,00	159.189.850,00	621.816.600,00	390,61
14	Belanja Persediaan Makanan Pokok	42.707.080,00	93.237.000,00	(50.529.920,00)	(54,20)
15	Lain-Lain Belanja Bahan/Material	3.353.301.750,00	1.818.222.279,00	1.535.079.471,00	84,43
16	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.026.468.707,00	1.667.172.065,00	359.296.642,00	21,55
17	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.507.153.382,00	2.704.238.152,00	(197.084.770,00)	(7,29)
18	Belanja Cetak	5.389.328.173,00	5.007.676.542,00	381.651.631,00	7,62
19	Belanja Penggandaan	3.559.099.285,00	3.661.747.739,00	(102.648.454,00)	(2,80)
20	Belanja Barang dan Jasa BOK UPTD	-	6.521.319.450,00	(6.521.319.450,00)	(100,00)
21	Belanja Barang dan Jasa BOP UPTD	-	3.129.843.093,00	(3.129.843.093,00)	(100,00)
22	Belanja Barang Dana BOS	25.165.901.940,00	-	25.165.901.940,00	100,00
23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.098.882.175,00	16.164.957.094,00	5.933.925.081,00	36,71
24	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.925.001.226,00	9.024.863.199,00	(1.099.861.973,00)	(12,19)
25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	4.565.562.473,00	12.608.943.406,00	(8.043.380.933,00)	(63,79)
26	Belanja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Gratis	17.513.955.823,00	-	17.513.955.823,00	100,00
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.210.575.732,30	52.065.722.199,40	7.144.853.532,90	13,72
28	Belanja Barang dan Jasa Kapitasi JKN FKTP UPTD Puskesmas	13.336.873.037,75	3.510.865.556,00	9.826.007.481,75	279,87
29	Belanja Barang dan Jasa UPTD	14.846.073.704,00	-	14.846.073.704,00	100,00
30	Belanja Pemeliharaan Jalan	-	993.560.771,00	(993.560.771,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Persediaan	195.690.087.374,61	132.842.928.165,66	62.847.159.208,95	47,31

Beban Barang pada Laporan Operasional adalah sebesar Rp195.898.212.354,61 sedangkan Belanja Barang pada LRA sebesar Rp191.930.296.298,00, terdapat selisih sebesar Rp3.759.791.076,61, perbedaan tersebut disebabkan yang terdiri dari:

Mutasi bertambah :

- Saldo persediaan awal Tahun Anggaran 2018 yang sebesar Rp10.889.191.361,85
- Utang Belanja Cetak sebesar Rp152.880.000,00
- Utang Belanja JKN Kapitasi JKN FKTP UPTD Puskesmas sebesar Rp264.156.700,00
- Utang Belanja Dana Kapitasi JKN sebesar Rp272.736.650,00
- Utang Obat dan Jasa Pelayanan pada BLUD sebesar Rp5.328.493.271,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Utang Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp67.955.962,00

Mutasi berkurang :

- Saldo Persediaan Akhir yang berasal dari belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.205.442.433,99
- Pelunasan Utang Belanja Cetak sebesar Rp307.415.553,00
- Pelunasan Utang Belanja JKN Kapitasi JKN FKTP UPTD Puskesmas sebesar Rp557.175.788,00
- Pelunasan Utang Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp28.476.700
- Pelunasan Utang Obat dan Jasa BLUD sebesar Rp2.295.296.678,00
- Reklas Belanja Barang ke Belanja Modal sebesar Rp451.210.303,00
- Persediaan Obat yang kadaluarsa sebesar Rp66.550.593,25
- Pelunasan Utang Belanja Hibah sebesar Rp338.728.819,00

4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp82.712.086.624,05 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 59
 Rincian Beban Jasa
 (dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Honorarium PNS	6.110.615.748,00	20.725.791.750,00	(14.615.176.002,00)	(70,52)
2	Honorarium Non PNS	-	227.150.000,00	(227.150.000,00)	(100,00)
3	Belanja Telepon	106.885.142,00	147.434.826,00	(40.549.684,00)	(27,50)
4	Belanja Air	127.488.600,00	86.366.300,00	41.122.300,00	47,61
5	Belanja Listrik	4.856.941.450,00	5.245.096.035,00	(388.154.585,00)	(7,40)
6	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	9.000.000,00	-	9.000.000,00	100,00
7	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.687.960.000,00	1.724.166.000,00	(36.206.000,00)	(2,10)
8	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.223.506.476,00	358.133.998,00	865.372.478,00	241,63
9	Belanja Paket/Pengiriman	33.246.500,00	55.856.875,00	(22.610.375,00)	(40,48)
10	Belanja Sertifikasi	122.994.180,00	79.964.000,00	43.030.180,00	53,81
11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.691.670,00	212.661,67	1.479.008,33	695,47
12	Belanja Jasa Transportasi	3.950.770.890,00	3.095.616.446,00	855.154.444,00	27,62
13	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.800.000,00	53.400.000,00	(21.600.000,00)	(40,45)
14	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.291.502,00	16.299.770,00	(4.008.268,00)	(24,59)
15	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak Ketiga	10.119.287.355,00	9.467.400.390,00	651.886.965,00	6,89
16	Belanja Jasa Moderator/MC	72.050.000,00	88.750.000,00	(16.700.000,00)	(18,82)
17	Belanja Jasa Umum	31.783.206.983,00	25.581.962.316,00	6.201.244.667,00	24,24
18	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	291.600.000,00	173.308.050,00	118.291.950,00	68,26
19	Belanja Jasa Service	618.846.686,00	-	618.846.686,00	100,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
20	Belanja Jasa KIR	1.125.960,00	-	1.125.960,00	100,00
21	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	302.518.692,01	107.696.351,00	194.822.341,01	180,90
22	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.985.371,04	-	22.985.371,04	100,00
23	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-	2.354.841.050,00	(2.354.841.050,00)	(100,00)
24	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.192.630.500,00	-	2.192.630.500,00	100,00
25	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	293.690.000,00	359.160.570,00	(65.470.570,00)	(18,23)
26	Belanja Sewa Alat Berat	348.392.750,00	-	348.392.750,00	100,00
27	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	658.535.332,00	1.453.233.487,00	(794.698.155,00)	(54,68)
28	Belanja Makanan dan Minuman	12.123.058.920,00	11.442.438.400,00	680.620.520,00	5,95
29	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	383.820.000,00	290.824.000,00	92.996.000,00	31,98
30	Belanja Pakaian Kerja	1.116.561.721,00	663.203.000,00	453.358.721,00	68,36
31	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	456.923.600,00	497.908.320,00	(40.984.720,00)	(8,23)
32	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	74.000.000,00	120.000.000,00	(46.000.000,00)	(38,33)
33	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.013.626.596,00	3.343.827.000,00	(1.330.200.404,00)	(39,78)
34	Belanja Jasa Konsultansi	968.784.000,00	689.809.000,00	278.975.000,00	40,44
35	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	-	33.609.173.175,00	(33.609.173.175,00)	(100,00)
36	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	929.105.481,33	(929.105.481,33)	(100,00)
37	Belanja Pelayanan Kesehatan Gratis	-	12.531.029.116,00	(12.531.029.116,00)	(100,00)
38	Uang Untuk di Berikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	595.250.000,00	8.000.000,00	587.250.000,00	7.340,63
Jumlah Beban Jasa		82.712.086.624,05	135.527.158.368,00	(52.815.071.743,95)	(38,97)

Beban Jasa Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 pada Laporan Operasional sebesar Rp82.712.086.624,05 sedangkan Belanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp77.525.389.461,05 terdapat selisih sebesar Rp5.186.697.163,00 Perbedaan tersebut disebabkan oleh:
Selisih lebih :

- Reklas Belanja Honorarium PNS sebesar Rp6.110.615.748,00
- Penambahan Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp53.606.188,00
- Penambahan Utang Pajak Kendaraan sebesar Rp129.089.715,00
- Belanja/Beban Dibayar dimuka (Belanja STNK) Tahun 2017 sebesar Rp85.938.157,00

Selisih kurang :

- Pelunasan Utang Barang Jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.080.000,00
- Pelunasan Utang Pajak Kendaraan Dinas 2016 sebesar Rp33.414.583,00
- Reklas Belanja Jasa ke Belanja Modal/Aset Tetap sebesar Rp1.158.058.062

4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.931.914.361,00 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 60
Rincian Beban Pemeliharaan
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Pemeliharaan Jalan	573.379.780,00	-	573.379.780,00	100,00
2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	209.950.658,00	327.452.630,00	(117.501.972,00)	(35,88)
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.197.017.363,00	1.165.631.501,00	31.385.862,00	2,69
4	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.991.612.110,00	2.185.510.934,00	806.101.176,00	36,88
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	862.862.450,00	393.692.900,00	469.189.550,00	119,18
6	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	97.072.000,00	102.548.850,00	(5.476.850,00)	(5,34)
	Jumlah Beban Pemeliharaan	5.931.914.361,00	4.174.836.815,00	1.757.077.546,00	42,09

4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 pada Laporan Operasional sebesar Rp65.373.789.933,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 61
Rincian Beban Perjalanan Dinas
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.796.070.400,00	19.447.144.117,00	(1.651.073.717,00)	(8,49)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.479.659.423,00	49.019.232.006,00	(1.539.572.583,00)	(3,14)
3	Belanja perjalanan dinas luar negeri	98.060.110,00	73.312.352,00	24.747.758,00	33,76
	Jumlah Beban Pemeliharaan	65.373.789.933,00	68.539.688.475,00	(3.165.898.542,00)	(4,62)

Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 pada Laporan Operasional sebesar Rp65.373.789.933 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp65.517.824.933,00 terdapat selisih sebesar Rp144.035.000,00, perbedaan tersebut adalah Reklas Belanja Perjalanan Dinas ke Aset Tetap

4.2.1.6 Beban Bunga

Untuk tahun 2018 tidak terdapat Beban Bunga pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

4.2.1.7 Beban Subsidi

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,00 yang merupakan beban pelaksanaan pasar murah di 9 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

4.2.1.8 Beban Hibah

Beban Hibah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.569.615.600,00 dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 62
Rincian Beban Hibah
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	9.811.815.600,00	9.808.746.850,00	3.068.750,00	0,03
2	Belanja Hibah Dana BOS	3.757.800.000,00	3.206.400.000,00	551.400.000,00	17,20
	Jumlah Beban Hibah	13.569.615.600,00	13.015.146.850,00	554.468.750,00	4,26

Beban Hibah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 pada Laporan Operasional sebesar Rp13.569.615.600,00 sedangkan Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp43.058.299.200,00, perbedaan ini disebabkan adanya mutasi kurang antara lain :

- Reklasifikasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp28.893.433.600,00.
- Reklasifikasi Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp595.250.000,00

4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.086.704.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63
Rincian Beban Bantuan Sosial
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bantuan Sosial kepada Masyarakat/Organisasi Sosial Kemasyarakatan	5.305.013.400,00	3.592.300.000,00	1.712.713.400,00	47,68
2	Bantuan Kepada Partai Politik	781.691.000,00	724.764.000,00	56.927.000,00	7,85
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	6.086.704.400,00	4.317.064.000,00	1.769.640.400,00	40,99

Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional sebesar Rp6.086.704.400,00 dan terdapat selisih dengan Belanja Bantuan Sosial di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp216.414.961.709,00 terdapat perbedaan sebesar Rp210.328.257.309,00 yang merupakan Reklas Bantuan Sosial ke Beban Transfer

4.2.1.10 Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp112.557.749.289,19 yang terdiri dari penyusutan Aset Tetap sebesar Rp111.316.204.386,71 dan penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.241.544.902,48, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 64
Rincian Beban Penyusutan
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.511.555.376,55	29.059.150.867,69	4.452.404.508,86	15,32
	Beban Penyusutan Alat-alat Besar	2.566.248.049,29	1.909.829.488,71	656.418.560,58	34,37
	Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	6.853.945.440,14	6.887.252.896,19	(33.307.456,05)	(0,48)
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	226.406.716,00	238.322.856,30	(11.916.140,30)	(5,00)
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	127.658.356,00	111.194.321,00	16.464.035,00	14,81
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.621.332.631,00	7.795.614.706,66	825.717.924,34	10,59
	Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	992.503.036,00	862.891.310,33	129.611.725,67	15,02
	Beban Penyusutan Alat-alat Kedokteran	10.731.225.027,00	7.273.919.012,80	3.457.306.014,20	47,53
	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	3.391.191.121,12	3.978.814.609,69	(587.623.488,57)	(14,77)
	Beban Penyusutan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.045.000,00	1.311.666,00	(266.666,00)	(20,33)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.699.660.568,00	16.008.426.285,78	2.691.234.282,22	16,81
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	18.441.828.501,01	15.735.396.414,78	2.706.432.086,23	17,20
	Beban Penyusutan Monumen	257.832.066,99	273.029.871,00	(15.197.804,01)	(5,57)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.865.642.615,70	73.374.713.950,59	(14.509.071.334,89)	(19,77)
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	48.308.490.024,00	64.775.717.863,56	(16.467.227.839,56)	(25,42)
	Beban Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	10.042.356.407,70	8.182.903.049,00	1.859.453.358,70	22,72
	Beban Penyusutan Instalasi	109.694.652,00	95.984.044,00	13.710.608,00	14,28
	Beban Penyusutan Jaringan	405.101.532,00	320.108.994,03	84.992.537,97	26,55
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	239.345.826,46	-	239.345.826,46	100,00
	Beban Penyusutan Aset Non Operasional	107.593.245,46	-	107.593.245,46	100,00
	Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	131.752.581,00	-	131.752.581,00	100,00
	Jumlah Aset Tetap	111.316.204.386,71	118.442.291.104,06	(7.126.086.717,35)	(6,02)
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain				
	Beban Penyusutan Aset Non Operasional	1.165.527.412,00	5.499.027.309,00	(4.333.499.897,00)	(78,80)
	Beban Penyusutan Aset Rusak Berat	76.017.490,48	16.738.228,88	59.279.261,60	354,15
	Jumlah Aset Lain-Lain	1.241.544.902,48	5.515.765.537,88	(4.274.220.635,40)	(77,49)
	Jumlah Beban Penyusutan	112.557.749.289,19	123.958.056.641,94	(11.400.307.352,75)	(9,20)

4.2.1.11 Beban Amortisasi

Jumlah Beban Amortisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp342.115.155,00.

4.2.1.12 Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.396.662.241,93 yang terdiri dari Penyisihan Piutang sebesar Rp 2.298.796.191,93 dan Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp97.866.050,00, rincian beban penyisihan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 65
Rincian Beban Penyisihan
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	-	2.940.400,00	(2.940.400,00)	(100,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	8.809,38	-	8.809,38	100,00
3	Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2	690.115.055,52	385.756.277,01	304.358.778,51	78,90
4	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar	386.100,00	2.001.407,20	(1.615.307,20)	(80,71)
5	Penyisihan Piutang Retribusi Ho	-	13.597.600,00	(13.597.600,00)	(100,00)
6	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	1.449.943,00	73.749,50	1.376.193,50	1.866,04
7	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah	52.951.004,21	-	52.951.004,21	100,00
8	Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.143.450,00	63.525,00	1.079.925,00	1.700,00
9	Penyisihan Piutang Transfer Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	565.067.121,15	26.581.562,29	538.485.558,86	2.025,79
10	Penyisihan Piutang BPJS	828.486.411,66	845.461.735,26	(16.975.323,60)	(2,01)
11	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	159.188.297,03	7.120.671,01	152.067.626,02	2.135,58
	Jumlah Penyisihan Piutang	2.298.796.191,93	1.283.596.927,27	1.015.199.264,66	79,09
	Penyisihan Piutang TGR	97.866.050,00	263.392.740,20	(165.526.690,20)	(62,84)
	Jumlah Penyisihan	2.396.662.241,93	1.546.989.667,47	849.672.574,46	54,92

4.2.1.13 Beban Lain Lain

Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp170.217.000,00 yang diperuntukkan untuk bantuan kepada 40 (empat puluh) KK di Desa Pengkedekan, Desa Buntu Torpedo Kecamatan Sabbang yang tertimpa bencana angin puting beliung sebesar Rp140.217.000,00 SK No. 188.4.45/489/XII/2018 dan Bantuan Kepada Ikatan Pelajar Mahasiswa Palu yang tertimpa Bencana Alam Gempa Bumi sebesar Rp30.000.000,00

4.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 terealisasi pada Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp70.737.597.109,00

Tabel 66
Rincian Beban Transfer
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.927.521.000,00	1.403.541.000,00	523.980.000,00	37,33
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	429.763.000,00	319.397.000,00	110.366.000,00	34,55
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	68.180.313.109,00	200.255.171.000,00	(132.074.857.891,00)	(65,95)
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100,00
	Jumlah Beban Transfer	70.737.597.109,00	201.978.109.000,00	(131.240.511.891,00)	(64,98)



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Transfer pada Laporan Operasional sebesar Rp70.737.597.109,00 sedangkan Belanja Transfer di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.598.832.000,00, terdapat selisih sebesar Rp68.380.313.109,00 perbedaan tersebut disebabkan reklas Bantuan keuangan kepada desa Rp68.180.313.109,00 dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah sebesar Rp200.000.000,00.

4.2.3 SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/ (Defisit) dari kegiatan non operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk tahun 2018 sebesar (Rp22.646.608.612,11) yang terdiri dari :

Tabel 67
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
(dalam rupiah)

No	Uraian	REALISASI 2018	REALISASI 2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Pelunasan Piutang BPJS	775.151.924,80	332.693.495,72	442.458.429,08	132,99
	Pelunasan Piutang Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	1.206.975,00	-	1.206.975,00	100,00
	Pelunasan Piutang Retribusi Daerah - Menara Telekomunikasi	1.401.240,50	-	1.401.240,50	100,00
	Pelunasan Piutang Retribusi Daerah - Pasar	2.882.292,00	1.865.104,00	1.017.188,00	54,54
	Pelunasan Piutang PBB	29.829.216,60	12.374.453,50	17.454.763,10	141,05
	Pelunasan Piutang Pajak Daerah	4.606.700,00	973.000,00	3.633.700,00	373,45
	Pelunasan Piutang Retribusi Daerah - HO	8.945.000,00	4.862.400,00	4.082.600,00	83,96
	Pelunasan Piutang DBH	531.631.245,70	-	531.631.245,70	100,00
	Pelunasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	142.413.420,20	-	142.413.420,20	100,00
	Pelunasan Piutang Lainnya - Lain-Lain PAD yg Sah	32.363.932,00	-	32.363.932,00	100,00
	Pelunasan TGR	16.246.736,70	6.999.375,00	9.247.361,70	132,12
	Pelunasan Dana Bergulir	7.555.000,00	4.450.000,00	3.105.000,00	69,78
	Jumlah Surplus Non Operasional	1.554.233.683,50	364.217.828,22	1.190.015.855,28	326,73
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Ekstakompatabel Belanja Modal 2018	(9.827.903.066,00)	(11.490.329.111,21)	1.662.426.045,21	(14,47)
	Penghapusan Aset Tetap 2018	(576.984.878,00)	(849.915.438,00)	272.930.560,00	(32,11)
	Penghapusan Aset Non Operasional	(13.729.403.758,36)	-	(13.729.403.758,36)	100,00
	Persediaan Obat ED	(66.550.593,25)	-	(66.550.593,25)	100,00
	Jumlah Defisit Non Operasional	(24.200.842.295,61)	(12.340.244.549,21)	(11.860.597.746,40)	96,11
	Jumlah Surplus/Defisit Non Operasional	(22.646.608.612,11)	(11.976.026.720,99)	(10.670.581.891,12)	89,10

4.2.4 POS LUAR BIASA

Untuk tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak terdapat Pos Luar Biasa.



4.2.5 SURPLUS DEFISIT-LO

Surplus Defisit – LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Berdasarkan penerimaan Pendapatan-LO sebesar Rp1.170.334.847.069,31, realisasi Beban-LO sebesar Rp999.573.388.304,77 dan Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp22.646.608.612,11) dan tidak terdapat Pos Luar Biasa sehingga Pemerintah mendapatkan Surplus-LO sebesar Rp148.114.850.152,43.

5. LAPORAN ARUS KAS

1.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp254.363.245.112,52 dan Rp266.141.669.388,25 yang terdiri dari :

Tabel 68
 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Arus Kas Masuk	1.282.189.169.240,52	1.208.575.898.468,13
2	Arus Kas Keluar	1.027.825.924.128,00	942.434.229.079,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		254.363.245.112,52	266.141.669.388,25

1.1.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.282.189.169.240,52 dan Rp1.208.575.898.468,13 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 69
 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Pajak Daerah	19.535.300.198,00	16.660.609.033,80
2	Retribusi Daerah	11.226.190.227,00	9.600.875.784,00
3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.707.466.202,00	1.527.430.097,40
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	80.178.281.737,52	79.268.576.902,93
5	Dana Bagi Hasil Pajak	11.617.170.140,00	13.953.149.550,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4.915.566.810,00	4.068.658.399,00
7	Dana Alokasi Umum	655.693.773.000,00	653.395.912.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	255.514.760.202,00	241.266.392.667,00
9	Dana Penyesuaian	8.750.000.000,00	7.500.000.000,00
10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi	27.821.713.056,00	29.115.057.608,00
11	Dana Bagi Hasil Lainnya	14.521.893.133,00	14.657.179.426,00
12	Hibah	1.836.000.000,00	600.771.400,00
13	Pendapatan Lainnya	188.871.054.535,00	136.961.285.600,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.282.189.169.240,52	1.208.575.898.468,13

1.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018 dan 2016 untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.027.825.924.128,00 dan Rp942.434.229.079,88 dengan perincian sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 70
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Pembayaran Pegawai	446.264.057.716,00	432.162.136.824,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	319.461.104.503,00	265.548.765.229,88
3	Pembayaran Subsidi	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Pembayaran Hibah	43.058.299.200,00	37.370.901.306,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	216.414.961.709,00	204.572.235.000,00
6	Pembayaran Tidak Terduga	170.217.000,00	957.252.720,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.927.521.000,00	1.403.541.000,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	429.763.000,00	319.397.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.027.825.924.128,00	942.434.229.079,88

1.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp 260.129.513.800,00) dan (Rp282.857.965.171,00) yang terdiri dari:

Tabel 71
Rincian Arus Kas untuk Aktivitas Investasi
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Arus Kas Masuk	18.017.950,00	-
2	Arus Kas Keluar	260.147.531.750,00	282.857.965.171,00
	Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(260.129.513.800,00)	(282.857.965.171,00)

1.2.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018 untuk Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp18.017.950,00 yang merupakan Penjualan atas Aset Tetap - Peralatan Mesin.

1.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp260.147.531.750,00 dan Rp282.857.965.171,00 yang terdiri dari:

Tabel 72
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Perolehan Tanah	2.484.860.746,00	5.092.072.100,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	49.666.786.885,00	49.718.713.561,00
3	Perolehan Bangunan dan Gedung	45.746.603.303,00	42.329.209.529,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	157.065.227.976,00	179.896.489.430,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.184.052.840,00	5.821.480.551,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	260.147.531.750,00	282.857.965.171,00



1.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar (Rp8.828.445.000,00) dan kas bersih yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.995.550.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 73
Rincian Arus Kas Aktivitas Pendanaan
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Arus Kas Masuk	171.555.000,00	4.450.000,00
2	Arus Kas Keluar	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan		(8.828.445.000,00)	(2.995.550.000,00)

1.3.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp171.555.000,00 dan Rp4.450.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 74
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
2	Penerimaan Sisa Kas Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-
3	Penerimaan Piutang Dana Bergulir	7.555.000,00	4.450.000,00
4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	164.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk		171.555.000,00	4.450.000,00

1.3.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp9.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sul-Sel.

1.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas transitoris pada tahun 2018 adalah sebesar (Rp1.940.808,33) sedangkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp4.634.584,33.

Tabel 75
Rincian Arus Kas Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016
1	Arus Kas Masuk	64.129.466.172,00	65.721.943.292,33
2	Arus Kas Keluar	64.131.406.980,33	65.717.308.708,00
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Transitoris		(1.940.808,33)	4.634.584,33

1.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dari aktivitas transitoris



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

adalah sebesar Rp64.129.466.172,00 dan Rp65.721.943.292,33 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 76
Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Penerimaan PFK	64.129.466.172,00	65.721.943.292,33
Jumlah Arus Kas Masuk		64.129.466.172,00	65.721.943.292,33

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp64.129.466.172,00 berasal dari Penerimaan PFK tahun berkenaan sebesar Rp64.120.711.756,00, Penerimaan Pajak dan Jasa Giro dari pengelolaan Dana JKN sebesar Rp1.262.902,00 dan Penerimaan Pajak pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.491.514,00

1.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp64.131.406.980,33 dan Rp65.717.308.708,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 77
Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017
1	Pengeluaran PFK	64.131.406.980,33	65.717.308.708,00
Jumlah Arus Kas Masuk		64.131.406.980,33	65.717.308.708,00

Arus kas keluar yang diperoleh dari aktivitas transitoris adalah sebesar Rp64.131.406.980,33 berupa Penyetoran PFK tahun berkenaan sebesar Rp64.120.711.756,00 Penyetoran Pajak pada Bendahara Pengeluaran tahun 2017 sebesar Rp 5.409.790,00 dan Penyetoran Pajak dan Jasa Giro pada Bendahara Pengelola JKN sebesar Rp5.285.434,33

1.5 KENAIKAN/ PENURUNAN KAS

Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp254.363.245.112,52
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp260.129.513.800,00)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp 8.828.445.000,00)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp1.940.808,33)
Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2018 mengalami Penurunan Kas sebesar (Rp14.596.654.495,81)

1.6 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan Akumulasi dari :

- 1) Penurunan Kas sebesar (Rp14.596.654.495,81)
- 2) Saldo Awal Kas sebesar Rp20.921.581.430,06



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Berdasarkan akumulasi diatas maka Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.277.512.534,25 yang terdiri dari:
- Kas di Kasda sebesar Rp5.261.874.869,96;
 - Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.491.514,00;
 - Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.358.000,00;
 - Kas di BLUD sebesar Rp156.240.415,89;
 - Kas di Bendahara BOS sebesar Rp8.957.600,00.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Jumlah Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.335.711.678.453,73 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 78
Perubahan Ekuitas
(dalam rupiah)

No	Uraian	2018	2017
1	EKUITAS AWAL	1.251.997.580.307,48	981.552.542.223,15
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	148.114.850.152,43	150.528.096.823,01
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(64.400.752.006,18)	119.916.941.261,33
	Koreksi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		(8.000.000,00)
	Koreksi Utang Belanja - JKN		(21.204.536,00)
	Koreksi Kas Tahun 2016		(2.437.435,00)
	Pembayaran Utang Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 2)		271.589.120,00
	Koreksi Utang Belanja - Pegawai		(34.020.516,00)
	Koreksi Penyusutan Tahun Sebelumnya		111.982.719.424,76
	Koreksi Aset Tetap Tahun Sebelumnya		1.413.655.476,00
	Mutasi Keluar Aset Tetap		-
	Mutasi Keluar Penyusutan Aset Tetap		(26.257.664,00)
	Koreksi Nilai Utang Belanja Tahun Sebelumnya		2.182.000,00
	Koreksi Penghapusan Utang Belanja Tahun Sebelumnya		3.200.000,00
	Mutasi Keluar Aset Rusak Berat		(7.000.000,00)
	Mutasi Keluar Penyisihan Aset Rusak Berat		758.333,33
	Koreksi Penyisihan Aset Non Operasional Tahun Sebelumnya		6.341.628.808,24
	Koreksi Utang Barang Jasa		128.250,00
	Koreksi Saldo Awal Dana BOS (Saldo Akhir 2017)	(5.600.000,00)	
	Koreksi Saldo Piutang BPJS RSUD Andi Djemma	(1.996.241.763,00)	
	Koreksi Saldo Penyisihan Piutang BPJS RSUD Andi Djemma	9.981.208,82	
	Koreksi Utang Hibah	76.600,00	
	Koreksi Utang Pegawai	(140.001.766,44)	
	Koreksi Utang Belanja Modal	(20.250.000,00)	
	Penghapusan Utang Belanja Modal	9.966.350,26	
	Koreksi Uang Muka Belanja	88.110,00	
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap	1.118.550.000,00	
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap (penyusutan)	(11.978.819.614,37)	



Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
*Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

No	Uraian	2018	2017
	Mutasi Keluar Aset Tetap (Hibah Keluar)	(234.726.000,00)	
	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(665.051.762,00)	
	Mutasi Keluar Aset Non Operasional (P3D)	(72.767.982.567,03)	
	Mutasi Keluar Penyusutan Aset Non Operasional (P3D)	21.870.669.332,09	
	Koreksi Piutang Lainnya	680.199.704,00	
	Koreksi Penyisihan Piutang Lainnya	(339.428.970,50)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	57.819.050,00	
	Koreksi Aset Tetap - Tanah	82,00	
5	EKUITAS AKHIR	1.335.711.678.453,74	1.251.997.580.307,48

7. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Per 31 Desember 2018 berdasarkan hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan dengan Opini Lapora Keuangan menyajikan secara wajar, Mengungkapkan :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN :

- Pendapatan LRA dianggarkan sebesar Rp118.208.292.223,00 dan teralisasi sebesar Rp122.920.146.579,00 atau 103,99%
- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp84.312.675.205,00 dan terealisasi sebesar Rp87.601.553.915,00 atau 103,99%
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp35.471.323.597,00 dan teralisasi sebesar Rp33.383.767.597,00 atau 94,11%
- Surplus Tahun Berjalan sebesar Rp1.934.825.067,00

NERACA :

- Total aset sebesar Rp94.399.612.868,00, yang terdiri dari :
 - Aset Lancar sebesar Rp21.915.260.827
 - Nilai Buku Aset Tetap sebesar Rp72.397.137.041,00
 - Nilai Buku Aset Lainnya sebesar Rp87.215.000,00
- Total Kewajiban yang merupakan kewajiba jangka pendek sebesar Rp5.328.493.361,00
- Ekuitas sebesar Rp90.236.445.836,00, yang terdiri dari :
 - Ekuitas Awal sebesar Rp59.407.809.265,00
 - Surplus Tahun Berjalan sebesar Rp30.688.912.949,00
 - Koreksi Kesalahan Akuntansi sebesar Rp(1.025.602.707,00)

LAPORAN OPERASIONAL :

- Pendapatan-LO sebesar Rp128.131.926.999,00
- Beban Operasional sebesar Rp88.249.852.025,00, yang terdiri dari :
 - Biaya Pelayanan sebesar Rp47.717.285.411,00
 - Biaya Umum dan Administrasi sebesar RpRp.40.532.566.614,00
- Beban Non Operasional sebesar Rp9.193.162.025,00



- Surplus Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp30.688.912.949,00.

LAPORAN ARUS KAS :

- Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp74.724.994.418,00
- Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasio sebesar Rp71.942.349.433,00
- Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp2.781.551.579,00
- Kenaikan Kas Bersih sebesar Rp1.093.406,00
- Kas dan Setara Kas Awal sebesar Rp155.147.010,00
- Jumlah Saldo Kas sebesar Rp156.240.416,00

Laporan Keuangan BLUD RSUD Andi Jemma disajikan pada *lampiran 5*.

- b. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dapat kami jelaskan sebagai berikut :
- Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 166 Desa di 12 Kecamatan. Sampai dengan 31 Desember 2018 ada 65 Desa yang telah melaporkan pertanggungjawaban Dana Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total Pendapatan sebesar Rp68.721.173.239,00 total Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.418.782.121,00 sedangkan total realisasi Belanja APBD Desa untuk tahun 2018 sebesar Rp64.437.859.455,00 dan Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.557.975.606,00 sehingga total SILPA APBD Desa untuk tahun 2018 sebesar Rp3.144.120.299,00. Rincian ikhtisar Realisasi pelaksanaan APBD Desa dapat dilihat pada *lampiran 24*.



BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap, andal dan akuntabel kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka perwujudan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 secara keseluruhan.

Masamba, 27 Maret 2019

BUPATI LUWU UTARA, 



INDAH PUTRI INDRIANI